

# SINERGI

BULETIN BPIW

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR  
BADAN PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR WILAYAH



[www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)



Edisi 15/Maret 2017

## Pra Konsultasi Regional Padukan Perencanaan Sektor PUPR

Membumikan NUA,  
Membangun Kota Layak Huni

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur  
PUPR dan Kesepakatan Konferensi PBB



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

# **INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI**

## **Gedung BPIW Lantai 1**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

Telp. +6221-2751 5804



[www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)



[@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)



[@informasiBPIW](https://www.instagram.com/informasiBPIW)



[Layanan Informasi BPIW](#)



[BPIWkementerianPUPR](#)

# SINERGI

BULETIN BPIW

**Pelindung:**

Rido Matari Ichwan

**Penasehat:**

Dadang Rukmana

**Pengarah:**

Bobby Prabowo  
Iwan Nurwanto  
Hadi Sucahyono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Pemimpin Redaksi:**

P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana:**

Shoviah

**Redaksi:**

M. Salahudin Rasyidi  
Mochammad Tranggono  
Hari Suharto Diyaksa  
Erwin Adhi Setyadi  
Wahyu Hendrastomo  
Melva Eryani Marpaung

**Editor :**

Hendra Djamal

**Kontributor:**

Mutri Batul Aini  
Ichlasul Naufal  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah  
Andhika Prabowo

---

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
(BPIW) Kementerian PUPR

---

**Alamat Redaksi:**

Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)  
Twitter: @informasiBPIW  
Youtube: Layanan informasi BPIW  
Facebook: BPIWkementerianPUPR  
No. Telp. +6221-2751 5804

---

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

---

Design : Heri Hito  
Kartunis: Oki Heryanto

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Maret 2017 ini kami akan memfokuskan soal pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Konreg) dalam menerpadukan dan mensinkronisasikan pengembangan infrastruktur PUPR.

Dalam Kabar Utama dikupas mengenai pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, kami menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti dalam rubrik wawancara. Pada rubrik tersebut dibahas seputar fokus Kementerian PUPR dalam perencanaan pengembangan infrastruktur.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai Membumikan *New Urban Agenda* (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan di Tanah Air terkait pengembangan dan pembangunan kota. Untuk rubrik opini dibahas mengenai keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Maret, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan dan rubrik Tips dibahas mengenai 5 Cara Menata ruang kerja kantor agar nyaman. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang Pra Konreg.

Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.



**01 SALAM REDAKSI**

**02 DAFTAR ISI**

**03 PERSPEKTIF**

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR dan Kesepakatan Konferensi PBB

**04 KABAR UTAMA**

Pra Konsultasi Regional Padukan Perencanaan Sektor PUPR

**12 REVIEW**

Mewariskan Kota Layak Huni

**13 GLOSSARY**

Istilah Tentang Pra Konreg



**14 WAWANCARA**

Prof. Anita Firmanti: Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur PUPR Harus Terus Ditumbuhkan

**18 TEROPONG MEDIA**

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak



**20 KILAS BPIW**

Temui Kepala BPIW, Tim PUG Kementerian PUPR Bahas Isu Gender

**36 LAPORAN KHUSUS**

Membumikan NUA, Membangun Kota Layak Huni

**40 OPINI**

Isu Disparitas Masih Relevan di Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali

**44 INFOGRAFIS**

Sistem Konektifitas Nasional Pulau Sumatera

**46 JALAN-JALAN**

Menikmati Eksotisme Kota Kupang

**48 WPS CORNER**

Wilayah Pengembangan Strategis 21 & 22

**50 TEKNOLOGI**

Enam Solusi Pembatas Air Karya Balitbang PUPR

**52 POTRET**

Pelaksanaan Pra Konreg di 4 kota

**58 TIPS**

5 Cara Menata Ruang Kerja Kantor Anda Agar Nyaman

**59 TOKOH**

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhailin: Prioritaskan Pengembangan Lima Kawasan Strategis



# Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR dan Kesepakatan Konferensi PBB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) untuk seluruh provinsi di Tanah Air. Pra Konreg digelar di empat lokasi yakni, untuk provinsi wilayah Sumatera di Palembang, untuk provinsi wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Surabaya, untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, serta untuk provinsi di Pulau Sulawesi dan Papua di Manado.

Setiap pelaksanaan Pra Konreg dibagi dalam 2 sesi, yaitu, sesi panel yang merupakan wahana penyampaian arah kebijakan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selaras dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kemudian dilanjutkan dengan sesi *desk* masing masing provinsi yang melibatkan empat sektor utama di bidang PUPR yaitu Sektor Sumber Daya Air, Jalan, Infrastruktur Permukiman dan Perumahan serta Bappeda Propinsi dan Dinas Propinsi yang terkait dengan PUPR.

Digelarnya pra konreg diharapkan dapat mengidentifikasi awal isu-isu strategis bidang PUPR tahun 2018, mengidentifikasi awal pekerjaan strategis dalam RPJMN. Kemudian, konsolidasi program tahun 2018 antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah. Digelarnya Pra Konreg ini juga untuk mensinkronkan, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing WPS di tahun 2018.

Pelaksanaan Pra Konreg memiliki nilai yang strategis dalam upaya mewujudkan visi yang sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yakni "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Sehingga diharapkan Pra Konreg dapat menciptakan peningkatan investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian bangsa.

Perencanaan yang dilaksanakan dalam Pra Konreg ini salah satunya juga berupaya mengadopsi hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau Konferensi Habitat III telah diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 2016 lalu.

Konferensi tersebut dihadiri perwakilan 197 negara anggota PBB dan menyepakati untuk mengadopsi *New Urban Agenda* (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan yang merupakan dokumen hasil konferensi tersebut.

NUA merupakan cetak biru landasan pembangunan perkotaan dalam mendukung 2030 Agenda *on Sustainable Development*, khususnya *Sustainable Development Goal II* yakni menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Indonesia berkomitmen mengadopsi dokumen NUA. Bahkan, Indonesia mengharapkan NUA dapat membantu mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi perkotaan di Indonesia.

NUA disepakati untuk 20 tahun kedepan sebagai panduan dalam pembangunan perkotaan dunia. Indonesia juga berkepentingan menyelenggarakan kesepakatan NUA dalam arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan, yakni berupaya menciptakan kota-kota menjadi lebih aman, inklusif dan tangguh, atau berdaya tahan terhadap bencana dan berkelanjutan. Dimana kota juga memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan. Sebab, Kota merupakan mesin pertumbuhan dan sekaligus pusat kreativitas. (\*\*)



# Pra Konsultasi Regional Padukan Perencanaan Sektor PUPR

*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), kembali menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di 4 kota di Indonesia. Kegiatan ini berhasil memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur sektor PUPR tahun 2018.*



*Prof. Anita Firmanti, Sekjen Kementerian PUPR*



Suasana diskusi Pra Konreg

Sumber: Dok. PUPR

Empat kota tempat berlangsungnya Pra Konreg ini adalah Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado. Pra Konreg di Kota Palembang diadakan di 7-9 Maret lalu. Pra Konreg di kota empek-empek ini untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Selanjutnya, Pra Konreg kedua, dilaksanakan di Kota Surabaya, 14-16 Maret lalu dan dihadiri para peserta dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pra Konreg ketiga, diadakan di Kota Kupang pada 21-23 Maret lalu dan diikuti peserta seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pra Konreg yang terakhir dilaksanakan di Manado pada 29-31 Maret 2017. Kegiatan ini digelar untuk seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Ada 4 tujuan pelaksanaan Pra Konreg. Pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Kedua, melakukan identifikasi awal terkait rencana aksi atau *output* pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program 2018 antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan memadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing WPS untuk tahun 2018. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti menekankan pentingnya keterpaduan pembangu-

nan infrastruktur sektor PUPR agar lebih efektif dan efisien. Forum ini menurutnya harus mendukung program pembangunan terpadu, dimana pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan berbasis pengembangan wilayah.

“Dengan keterpaduan setiap pembangunan infrastruktur, maka terdapat sinkronisasi mengenai tanggung jawab pembangunan infrastruktur baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota,” ujar Anita saat membuka Pra Konreg wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (7/3) lalu.

Menyinggung peran BPIW, menurut Anita BPIW punya peran penting dalam menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo terutama terkait Nawacita. “Setiap pembangunan infrastruktur yang kita lakukan berdasarkan arahan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Bila misalnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,75%, maka BPIW harus menghitung kawasan mana saja yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur,” kata Anita.

Selain itu menurut Anita perencanaan yang dibuat BPIW harus menjadi *guidance* yang mengarahkan pembangunan infrastruktur yang dibangun 4 unit organisasi atau unor Kementerian PUPR yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menambahkan program-program infrastruktur untuk 2018 tersebut telah diteliti sejak dikembangkannya WPS. “Didalam WPS ada ka-

“Dengan keterpaduan setiap pembangunan infrastruktur, maka terdapat sinkronisasi mengenai tanggung jawab pembangunan infrastruktur baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota,” ujar Anita

“Didalam *development plan* dapat diketahui infrastruktur mana yang dibiayai APBN, APBD, maupun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU,” tegas Rido.

wasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dan setiap pusat pertumbuhan dianalisis kebutuhan infrastruktur dan dirumuskan dalam waktu panjang dalam bentuk masterplan untuk periode 10 tahun. Kemudian dirinci dalam *development plan* 5 tahunan,” tuturnya. Kemudian pembangunan infrastruktur diuraikan lagi untuk kurun waktu tiga tahunan dan tahunan.

“Didalam *development plan* dapat diketahui infrastruktur mana yang dibiayai APBN, APBD, maupun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU,” tegas Rido. Setelah Pra Konreg digelar di 4 kota, Rido menilai kegiatan tersebut berhasil menterpadukan perencanaan pembangunan infrastruktur seluruh pulau dan kepulauan di Indonesia.

“Pra Konreg ini proses yang bermanfaat sekali, karena program-program prioritas itu dibahas dengan serius. Setidaknya 80 % program mendapat persetujuan dari daerah,” ungkap Rido.

Dikatakannya juga bahwa direktif Presiden mengenai pemerataan pembangunan juga menjadi catatan tambahan, dimana direktif tersebut akan direalisasikan pada program pembangunan infrastruktur PUPR untuk tahun 2018.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyambut baik dipilihnya NTT sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Pra Konreg. Baginya dengan ditunjuk sebagai tuan rumah, berarti Kementerian PUPR sangat memperhatikan pengembangan infrastruktur di NTT.

“Kita sangat membutuhkan dukungan Kementerian PUPR, apalagi ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di NTT, salah satunya masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat,” ungkap Frans. Dengan dukungan Kementerian PUPR, ia berharap tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Saat Pra Konreg digelar di Kota Manado, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw memberikan pendapatnya. Ia menilai pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan belanja daerah dan pada akhirnya dapat mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Utara. Steven juga memuji Kementerian PUPR yang selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsinya. “Saya bilang Kementerian PUPR koordinasinya mantap. Selalu berkoordinasi dengan kita,” puji Steven.

Selama Pra Konreg, ada beberapa program arahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Berikut uraiannya :

### Wilayah Sumatera

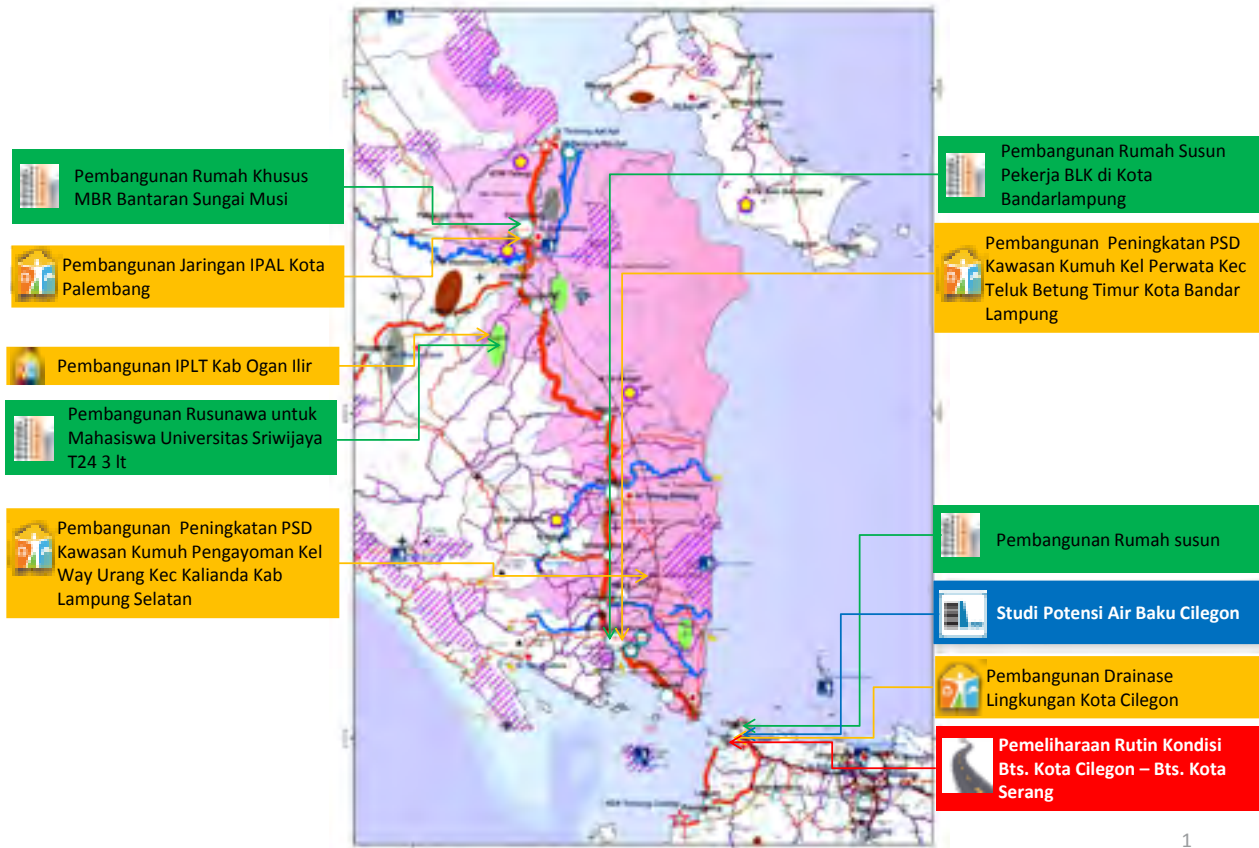
Di Pulau Sumatera ini, Kementerian PUPR memiliki banyak program, salah satunya mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan satu dari tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang difokuskan pemerintah. Dua KSPN lainnya adalah Borobudur di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan



## PROGRAM KETERPADUAN WPS 6 MERAK-BAKAUHENI-BANDAR LAMPUNG-PALEMBANG-TANJUNG API-API (MBBPT) 2018



1

Namun demikian, ada beberapa program arahan di 2018, salah satunya untuk WPS 6 Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-API. Pada WPS 6 ini akan dilakukan Pembangunan Rumah Khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Bantaran Sungai Musi dan Pembangunan Rumah Susun Pekerja BLK di Kota Bandar Lampung. Kemudian juga akan dibangun Rusunawa untuk Mahasiswa Universitas Sriwijaya dan Pembangunan Rumah Susun Pekerja BLK di Kota Bandar Lampung.

Selain itu akan dibangun Jaringan IPAL Kota Palembang, Pembangunan IPLT Kab. Ogan Ilir, dan Pembangunan Peningkatan PSD Kawasan Kumuh Pengayoman Kabupaten Lampung Selatan. Tidak hanya itu, program yang direncanakan yakni Pembangunan Peningkatan PSD Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung dan Pembangunan Drainase Lingkungan Kota Cilegon. Selanjutnya akan dilakukan Studi Potensi Air Baku Cilegon dan Pemeliharaan Rutin Kondisi Bts. Kota Cilegon – Bts. Kota Serang.

### Wilayah Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Provinsi NTB

Untuk wilayah ini BPIW telah membuat *Master Plan Infrastruktur PUPR 2025* terutama untuk Pulau Jawa-Bali. Pada wilayah Jawa – Bali ini, jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 924 km. Saat ini

yang sedang berjalan adalah program Pembangunan Jalan Tol Jawa-Bali seperti ruas jalan tol DKI Jakarta dan Pejagan-Pemalang. *Development Plan Infrastruktur PUPR 2015-2019* di Pulau Jawa-Bali juga dilakukan BPIW seperti pembangunan jalan Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi dan lanjutan Pembangunan Bendungan Karian.

Pembangunan bendungan ini dilaksanakan juga pada tahun 2017. BPIW juga telah membuat *Master Plan Infrastruktur PUPR 2020-2038* Kepulauan Nusa Tenggara seperti Pembangunan Jalan Waekelo Keroso, Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020.

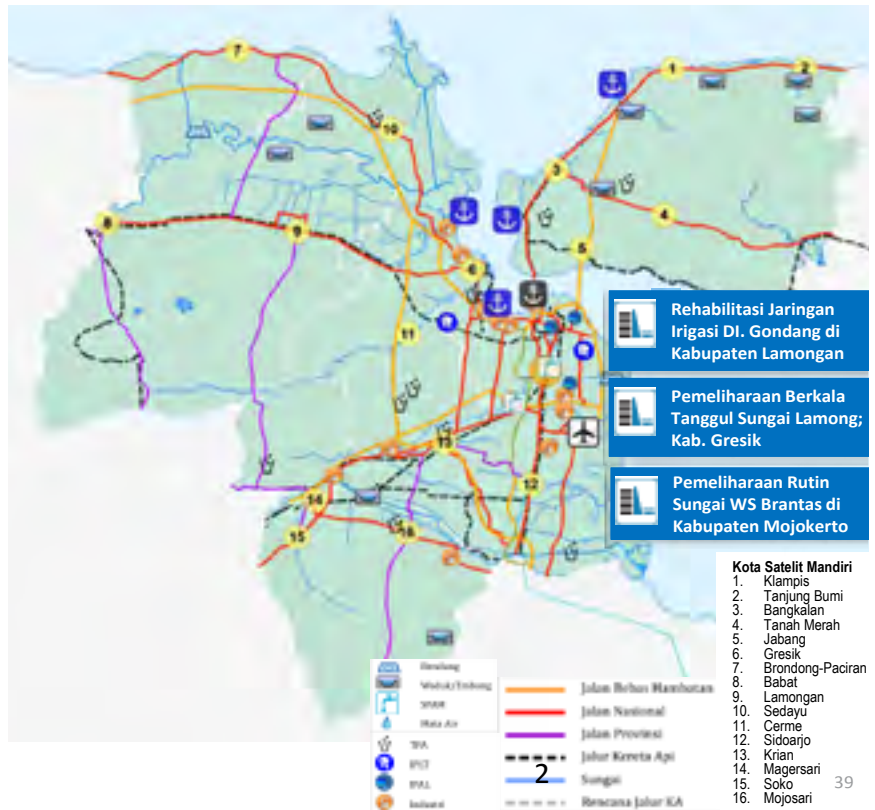
Sedangkan beberapa program arahan untuk 2018, seperti WPS 14 Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi. Untuk WPS 14 beberapa program arahnya seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya (OWRR) Kota Surabaya, pembangunan Jaringan Irigasi Waduk Bajulmati Kabupaten Banyuwangi, dan Peningkatan Jalan *Hotmix* di Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya, untuk Program Arahan KPS Gerbang-kertosusila 2018 beberapa diantaranya adalah Pembangunan Jembatan Sembayat Kab. Gresik dan Jalan Merr II C Kota Surabaya, serta Rehabilitasi Jembatan Sedayu Lawas Kab. Lamongan.

Untuk Program Arahan KPS Gerbang kertokusila 2018 beberapa diantaranya adalah Pembangunan Jembatan Sembayat Kab. Gresik dan Jalan Merr II C Kota Surabaya, serta Rehabilitasi Jembatan Sedayu Lawas Kab. Lamongan.

## PROGRAM KETERPADUAN METROPOLITAN GERBANGKERTOSUSILA 2018 (WPS 14)

-  **Pembangunan Jembatan Sembayat Kab. Gresik**
-  **Pembangunan Jalan Merr II C Kota Surabaya**
-  **Rehabilitasi Jembatan Sedayu Lawas Kab. Lamongan**
-  **Pembangunan Rumah Susun di Jambangan Pegangsaan Kota Surabaya**
-  **Pembangunan Rumah Susun Menanggal Kota Surabaya**
-  **Peningkatan Perumahan Swadaya untuk Mengatasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan**
-  **Pembangunan Sanimas Kab. Bangkalan**
-  **Pembangunan RTH Kws Sawunggaling Kec Babat Kab. Lamongan**
-  **Pembangunan SPAM Regional Mojolamong Kapasitas 150 Idet Kab. Mojokerto**



Kemudian juga akan dilakukan Pembangunan Rumah Susun di Jambangan Pegangsaan Kota Surabaya dan Rumah Susun Menanggal Kota Surabaya, serta Peningkatan Perumahan Swadaya untuk Mengatasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan.

Selain itu akan dibangun Sanimas Kab. Bangkalan, RTH Kws Sawunggaling Kab. Lamongan, dan SPAM Regional Mojolamong Kab. Mojokerto. Selanjutnya akan dilakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gondang di Kabupaten Lamongan, Pemeliharaan Berkala Tanggul Sungai Lamong; Kab. Gresik, dan Pemeliharaan Rutin Sungai WS Brantas di Kabupaten Mojokerto.

### Wilayah Pulau Kalimantan dan Provinsi NTT

Beberapa program arahan 2018 seperti pada WPS 19 Kupang – Atambua 2018. Untuk kawasan ini akan dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Jalan Terminal ALBN Kefamananu Kab. Timor Tengah Utara dan Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI Oetuke di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Program arahan lain seperti Program Arahan Perbatasan NTT. Beberapa pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan seperti Pembangunan Jalan Terminal ALBN Kefamananu, Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara Kabupaten

Timor Tengah Utara. Kemudian juga ada program Peningkatan permukiman masyarakat perdesaan khususnya pada daerah tertinggal yang tersebar di kawasan perbatasan.

BPIW juga telah membuat *Development Plan* Infrastruktur PUPR Pulau Kalimantan 2017-2019. Beberapa program infrastruktur yang akan dilaksanakan seperti pembangunan Jaringan Perpipaan Kawasan Kumuh (2017-2019), Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (2015-2017) sepanjang 3,05 km, dan Rumah Khusus di Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara 2017.

Selanjutnya, pada 2017 juga akan dilakukan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Regional Banjarbakula, TPA Mempawah, TPA Sekadau, TPA Kota Singkawang, TPA Murung Raya, TPA Sambutan Zona II Samarinda, dan TPA Pulau Sebatik.

### Wilayah di Sulawesi, Papua, dan Maluku

Untuk kawasan ini, beberapa program arahan seperti Program Arahan WPS 24 Manado-Bitung-Amurang-Kotamobagu 2018. Untuk program arahan WPS 24 ini, beberapa pembangunan infrastruktur yang direncanakan seperti Pembangunan Jalan Alternatif Manado – Tomohon sepanjang 2 kkm dan Pembangunan SPAM Regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan

Beberapa program arahan 2018 seperti pada WPS 19 Kupang – Atambua 2018. Untuk kawasan ini akan dilakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Jalan Terminal ALBN Kefamananu Kab. Timor Tengah Utara

Untuk Program Utama Metropolitan Bitung – Minahasa – Manado (Bimindo) Tahun 2018 seperti Pembangunan Jembatan Amat Kabupaten Sangihe dan Pembangunan Rusunawa Pekerja Kota Bitung.



Sebagian Ruas Jalan Tol Manado-Bitung

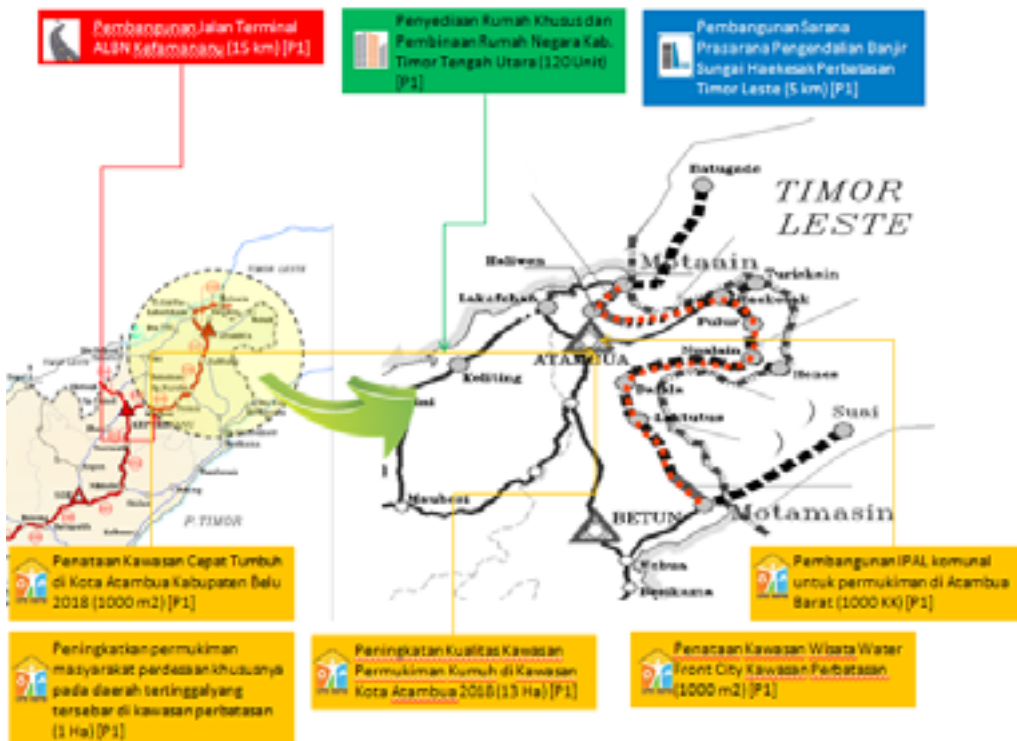
Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya ada program arahan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung 2018 seperti Dukungan Pengembangan Sistem Perpipaan Air Bersih untuk Kawasan Prioritas Bitung dengan Pembangunan SPAM Bitung. Selain itu ada juga Pembangunan Rusunawa Pekerja Kota Bitung.

Kemudian untuk Program Utama Metropolitan Bitung – Minahasa – Manado (Bimindo) Tahun 2018 seperti Pembangunan Jembatan Amat Kabupaten Sangihe dan Pembangunan Rusunawa Pekerja

- Kota Bitung. BPIW juga telah membuat *Masterplan*
- Infrastruktur PUPR Kepulauan Maluku 2020-2038
- seperti Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Buli dan Penataan Bangunan, dan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
- 
- BPIW juga telah membuat *Masterplan* Infrastruktur PUPR Pulau Papua 2020-2038. Program pembangunan yang direncanakan seperti Pembangunan SPAM Regional Warsamson di Kabupaten Raja Ampat dan Pembangunan Embung Pulau Salawati untuk mendukung kawasan pertanian seluas lebih kurang 20.000 Ha. **Tim Redaksi**
- 

**PROGRAM ARAHAN PERBATASAN NTT 2018**



# Sudut Pandang Seputar Pra Konreg

Pelaksanaan Pra Konreg berhasil diselenggarakan dengan baik. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan infrastruktur yang ada di daerah. Berikut beberapa komentar berkaitan dengan pelaksanaan Pra Konreg tahun 2017 ini, mulai dari Kota Palembang hingga berakhir di Kota Manado.



## **BPIW Diharapkan Mengakomodir Usulan Program dari Kabupaten maupun Kota**

**Amiruddin**, Kasubdit Infrastruktur Bappeda Sumatera Selatan

Program utama di Sumatera Selatan yang ingin kita masukkan dalam program 2018 terutama terkait pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang di Palembang. Selain itu program utamanya penyediaan air baku, pembangunan irigasi, SPAM, dan IPAL. Koordinasi, integrasi, sinergitas, dan simplikasi berjalan dengan baik, karena dilakukan dengan keterpaduan program, baik yang ada di daerah, pemerintah pusat, kota dan kabupaten. Dengan demikian program pembangunan infrastruktur sektor PUPR bisa dioptimalkan. Harapan kita BPIW kedepan dapat mengakomodir usulan-usulan, terutama program strategis kabupaten maupun kota yang mendukung program nasional.

## **Perlu Aturan Khusus Bagi Daerah yang Dikelilingi Lautan**

**Udi Harbian**, Kasubdit Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Pemprov Kepulauan Riau

Kami sangat menyambut baik pelaksanaan Pra Konreg ini, karena program pembangunan infrastruktur yang ada di daerah kami, dapat menjadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Khusus untuk Kepulauan Riau, dengan tipikal luas wilayah lautan dari daratan mungkin perlu ada aturan tersendiri yang tidak bisa disamakan daerah lain yang daratannya lebih luas ketimbang lautan. Dengan banyaknya lautan daripada daratan, sehingga jumlah jalan nasional di Kepulauan Riau terbatas. Sehingga perlu ada suatu mekanisme atau juknis tersendiri, sehingga jalan-jalan di Kepulauan Riau, dapat tertangani dengan pembiayaan dari APBN. Dengan adanya BPIW sebagai wadah yang menggabungkan usulan-usulan dari sektor sangat membantu daerah. Kepulauan Riau masuk dalam 2 WPS yakni WPS 3 Batam-Bintan-Tanjung Pinang dan WPS 35 Pulau-Pulau Terluar. Hal ini sangat baik untuk daerah kita, sehingga terjalin konektivitas antar kawasan yang ada di dua WPS tersebut.





## Konsultasi Regional Berjalan Dengan Baik

**Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT, Koordinator Desk Bangka Belitung**

Pada *desk* Provinsi Bangka Belitung ini, saya sebagai kordinator *desk* telah menjelaskan kepada para peserta mengenai bagaimana kita merencanakan infrastruktur ke PUPRan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Kemudian Kepala Bappeda juga telah menyampaikan potensi yang ada di daerahnya. Unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, yakni Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan, juga saling mendukung satu sama lain, misalnya terkait program pengamanan pantai. Secara umum, konsultasi untuk keterpaduan program sudah berjalan dengan baik, apalagi dengan adanya *rounddown* acara yang dibuat panitia, kegiatan di *desk* ini jadi terarah, meski di sisi lain, pagu anggaran Kementerian PUPR terbatas. Arahan program yang dibuat BPIW ternyata tidak terlalu jauh berbeda dengan kebutuhan daerah untuk membangun daerahnya, sehingga tidak terlalu sulit untuk kita padukan.

## Kementerian PUPR Lebih Sistematis

**Drs. Ahih, MT, Kepala Bappeda Kalimantan Barat**

Kementerian PUPR lebih sistematis dari kementerian lain, karena menyelenggarakan Pra Konreg yang dilanjutkan dengan Konreg. Selain itu juga menyatukan beberapa pemerintah provinsi dalam forum ini, dan itu cukup bagus. Dengan kegiatan ini memudahkan kita dalam pelaksanaan Musrenbang nanti. Jadi kita sudah ada acuan program infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang. Pada Pra Konreg ini kita berharap beberapa program unggulan dapat masuk dalam program Kementerian PUPR, seperti pengembangan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Selain itu juga program yang cukup strategis yakni pembangunan *Outer Ring Road* dan Jembatan Kapuas 3. Untuk BPIW, saya sarankan untuk lebih banyak lagi melakukan koordinasi dengan Bappeda, karena Bappeda mengetahui potensi yang ada di daerah yang dapat dikembangkan.



## Pra Konreg Sangat Menguntungkan Daerah

**Drs. Alberth Nauw, Kabid Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Papua Barat**

Pra Konreg ini perencanaan dilakukan dari bawah, sehingga ada mekanisme yang berjalan. Pra Konreg sangat besar keuntungan bagi daerah, karena dilakukan rasionalisasi terkait Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Dengan adanya kegiatan ini terjalin sinergitas antara perangkat pusat dengan daerah. Dengan adanya sinergi ini diharapkan suatu wilayah dan kawasan dapat berkembangnya dengan pesat. Kita melihat program seperti Trans Papua sangat positif dalam membuat konektivitas di beberapa kawasan di Papua, sehingga dapat mendorong potensi daerah. Masyarakat kita yang tersolir bisa menikmati dampak dari pembangunan. Hal ini penting, karena mereka juga bagian masyarakat. Terkait Trans Papua, kita berharap BPIW juga memperhatikan masalah alih trase atau pergeseran ruang dari dampak pembangunan jalan tersebut. Saya acungkan jempol untuk Pak Menteri PUPR, dimana saat ini pembangunan di Papua terus digalakkan.



## Dengan Keterpaduan Dalam Pra Konreg, Usulan Daerah Terakomodir

**Keliopas D, ST.MT. Kasubid Bina Marga dan Perhubungan Bappeda Papua**

Kami sangat berterimakasih karena Kementerian PUPR selalu mengundang kami membicarakan perencanaan infrastruktur baik Pra Konreg maupun Konreg. Apalagi pendekatan sekarang *money follow* program prioritas, dimana anggaran dialokasikan per sektor. Sehingga pertemuan ini penting buat kita. Saya kira paradigma *money follow* program merupakan paradigma pembangunan yang cukup maju. Program yang kita harapkan adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan Papua dengan Papua Nugini. Jembatan ini nantinya menjadi landmark Papua. Selain itu Infrastruktur jalan menuju bandara perlu ditingkatkan, karena tahun 2020, Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Dengan keterpaduan ini usulan kita diakomodir. Hal ini penting membuktikan bahwa Kementerian PUPR punya visi dalam membantu pembangunan di Papua. Kita berharap hasil dari Pra Konreg dan Konreg nantinya, disampaikan ke daerah, sehingga kita tahu hasil keterpaduan yang kita lakukan ini.





Judul Buku : Mewariskan Kota Layak Huni  
 Penerbit : Gramedia Pustaka Utama  
 Tahun Terbit : 2017  
 Jumlah halaman : XXIX, 280 hlm

## Mewariskan Kota Layak Huni

Kota saat ini telah menjadi sebuah tempat hunian untuk sebagian besar manusia di muka bumi. Oleh karena itu, banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah perkotaan, karena berhasilnya pengelolaan perkotaan berarti berhasil pula mengatur hunian untuk penduduknya yang banyak, meningkatkan taraf hidup serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Berbagai forum antarbangsa pun sangat menaruh perhatian yang tinggi terhadap masalah perkotaan. Pentingnya peran perkotaan secara eksplisit disampaikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs 2030). Selain itu, Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador Oktober 2016 yang lalu juga menegaskan kembali komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui kesepakatan Agenda Baru Perkotaan atau *New Urban Agenda* (NUA) sampai dengan 2036. Konferensi Habitat III tersebut mengambil tema “Urbanisasi Berkelanjutan” (*Sustainable Urbanization*). Pembangunan Habitat ke depan tidak dapat terfokus pada perkotaan itu sendiri, tetapi juga mencakup wilayah yang lebih luas. Implementasi NUA 2036 merupakan langkah penting untuk mewujudkan SDGs 2030 secara terpadu dan melibatkan pemangku kepentingan.

Sebagai pelaku pembangunan dan pengembangan perkotaan di Indonesia, pemerintah dan masyarakat berperan menyukseskan SDGs dan NUA tersebut. Pemerintah harus dapat menerapkan SDGs dan NUA dalam kerangka pengembangan perkotaan, sedangkan masyarakat turut mengawalinya. Indonesia sendiri telah menurunkan konsep NUA dalam langkah nyata berupa Aksi Baru Perkotaan Indonesia (ABPI) atau Indonesia *New Urban Action* (INUAAct).

Buku ini adalah pemaparan dari materi-materi yang disajikan dalam serangkaian kegiatan-kegiatan tersebut. Penulis dibantu tim Sekretariat, Dewan Eksekutif, dan Teman Serikat Kemitraan Habitat mengumpulkan materi paparan, dan memindahkan dalam format tulisan untuk memudahkan penulis menyunting dalam tulisan populer. Selain itu, penulis juga melakukan kajian *literature* dan kebijakan terkait, meliputi RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Hasil Kegiatan menuju Konferensi Habitat III (APUFY, APUF-6, APRM), Laporan Nasional Indonesia untuk Konferensi Habitat III, Kertas Kerja tentang Agenda Perkotaan Indonesia pada Sidang Prepcomm 3, Panduan internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah (IGUTO), dan Draft NUA Konferensi Habitat III.

Buku ini disusun dalam 5 bab. Bab pertama membahas mengenai identifikasi kecenderungan arah pengembangan perkotaan. Bab kedua membahas perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Bab ketiga menjabarkan tentang kemitraan dalam pembangunan perkotaan. Bab ke empat membicarakan tema utama buku ini yaitu “menuju Kota Layak Huni”. Sedangkan bab kelima ditutup dengan langkah menyusun aksi bersama. (**Mutri**)

“Penulis juga melakukan kajian *literature* dan kebijakan terkait, meliputi RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Hasil Kegiatan menuju Konferensi Habitat III”



# Istilah Tentang Pra Konreg

Pra Konreg adalah singkatan dari Pra Konsultasi Regional. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi awal isu-isu strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2018 sebagai bahan masukan pada saat pelaksanaan KONREG. Pada tahun 2017 ini, Pra Konreg dilaksanakan di 4 kota yaitu: Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado. Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam rangka pra-konreg:

**Desk Provinsi:** Merupakan rapat pembahasan isu-isu strategis bidang PUPR serta pembahasan rencana program dan anggaran kegiatan tahun 2018 untuk masing-masing provinsi.

Petugas Desk terdiri atas:

**Koordinator Desk:** Pejabat eselon II yang bertugas memimpin jalannya desk

**Penanggung jawab materi:** sub desk dan satminkal terkait (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan)

**Anggota Desk:** Dinas PUPR daerah, Balai/satker kementerian PUPR di daerah.

**Panitia:** bertugas mempersiapkan materi hasil pra konreg dalam setiap desk, melakukan notulensi dan administrasi desk.

**Peserta Desk:** Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas terkait PUPR

Provinsi, Kepala Satker, dan Balai yang Terdapat di Provinsi

**Output Desk:** Output desk adalah berupa 5 buah form, yaitu: F-ISU, F-RENSTRA, F-BASELINE, F-STOK, dan F-KSP.

**F-ISU** (format isu strategis): yaitu form untuk menjarang isu wilayah/ Isu RPIIUM/ Kegiatan Strategis yang perlu segera ditangani masing-masing provinsi beserta usulan penanganannya dari masing-masing sector.

**F-RENSTRA** (Format Rencana Aksi Pencapaian Target Renstra 2015-2019). Yaitu form yang memberikan informasi mengenai implementasi rencana/ target *output* prioritas dalam renstra 2015-2019, sampai pada kedetilan komponen per *output/* pekerjaan prioritas/ Strategis.

**F-BASELINE** (Format Baseline Program 2018): Merupakan pendetilan dari *baseline* program sesuai pagu sementara tahun 2018, sampai rincian paket yang dilengkapi dengan keterangan *readiness criteria*.

**F-STOK:** Format Stock Program 2018, yaitu rincian stok program (Rp. Usulan 2018 – Rp. Pagu Sementara 2018), sampai rincian aktivitas yang dilengkapi dengan keterangan *readiness criteria*.

**F-UPB** (Format Usulan Program Bersama 2018), adalah format usulan program bersama untuk tahun 2018 dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.



# Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur PUPR Harus Terus Ditumbuhkan

**Prof. Anita Firmanti**

.....  
*Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR*

Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) kembali digelar Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di 4 kota sepanjang Maret 2017. Empat kota tersebut yakni Palembang (7-9 Maret), Surabaya (14-16 Maret), Kupang (21-23 Maret), dan Manado (29-31 Maret). Kegiatan yang membahas program infrastruktur di seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2018 tersebut dilakukan dengan keterpaduan antar sektor di lingkungan Kementerian PUPR baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga melibatkan

Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti mengatakan keterpaduan dengan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan Pra Konreg ini harus terus ditumbuhkan, agar hasil kerja Kementerian PUPR lebih efektif dan berujung pada efisiensi kerja. Berikut penjelasan lebih lanjut Anita kepada Sinergi, beberapa waktu yang lalu.



**Sebagai apa pandangan Ibu terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia?**

Pembangunan infrastruktur secara nyata telah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dari meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB Nasional menjadi sebesar 5,1% pada tahun 2016, dibanding 4,8% pada tahun 2015.

Disisi lain, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Data dari *World Economic Forum* menunjukkan bahwa *ranking* Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia meningkat menjadi posisi 64 pada tahun 2016, naik dari posisi 72 dari tahun 2015.

Namun pembangunan infrastruktur dihadapkan beberapa tantangan, seperti disparitas Produk Domestik Bruto atau PDB, dimana PDB bersumber dari wilayah Jawa mencapai 58,5%. Akan tetapi di Bali dan Nusa Tenggara hanya menyumbang 13,1% PDB. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan disparitas ini.

Pada pembukaan Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada tanggal 7 Februari 2017, Presiden telah mengarahkan bahwa untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah, dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa. Tantangan lain yang kita hadapi adalah keterbatasan APBN.

**Apa langkah yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mengatasi tantangan tersebut?**

Untuk mengatasi masalah disparitas, kita saat

ini tengah menjalankan amanah Nawacita yakni membangun dari pinggiran, seperti melakukan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

Sedangkan terkait keterbatasan fiskal dalam pemenuhan prioritas nasional, kita perlu mendorong pendanaan pembangunan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan skema Dana Alokasi Khusus atau DAK Penugasan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan, dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. Keseluruhan skema ini dimaksudkan agar kita menjadikan APBN menjadi sumber pendanaan terakhir.

**Bagaimana dukungan Kementerian PUPR dalam kaitannya dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP untuk tahun anggaran 2018 ?**

Pada RKP tahun 2018 ini, Kementerian PUPR mendukung 8 dari 10 Prioritas Nasional yang telah ditetapkan, dan di dalamnya termasuk 4 Prioritas Nasional Tematik, yaitu kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, daerah pariwisata, kawasan ekonomi khusus kawasan industri, serta daerah tertinggal.

Seperti kita ketahui bersama, prioritas pembangunan di kawasan Jawa adalah pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN, antara lain KSPN Borobudur, KSPN Kepulauan Seribu, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, KSPN Tanjung Lesung, dan KSPN Mandalika. Selain itu Kawasan Industri atau KI, antara lain KI Gresik dan KI Serang.

Kementerian PUPR juga merencanakan pembangunan 59,85 kilometer jalan baru, 5,84 kilometer jalan tol baru, dan 2260 meter *flyover* maupun *underpass*

Pembangunan infrastruktur secara nyata telah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dari meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB Nasional menjadi sebesar 5,1% pada tahun 2016, dibanding 4,8% pada tahun 2015.



## PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM PADA RKP 2018



di tahun 2018. Selanjutnya di tahun tersebut, ada 17 bendungan *on-going*, antara lain Bendungan Kuningan di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Tugu di Jawa Timur, serta Bendungan Bintang Bano dan Mila di NTB.

Kemudian 6 bendungan baru yang harus dimulai pada tahun 2018, yaitu Bendungan Sadawarna di Jawa Barat, Bendungan Randugunting di Jawa Tengah, Bendungan Bagong dan Semantok di Jawa Timur, Bendungan Telaga Waja di Bali, serta Bendungan Meninting di NTB. Selain itu juga direncanakan pembangunan 25.000 hektar irigasi baru serta pembangunan 10 buah Sabo Dam.

### Seperti apa pula penyusunan program yang dilakukan Kementerian PUPR untuk tahun 2018?

Penyusunan program Kementerian PUPR pada tahun 2018 dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan wilayah dengan melanjutkan pekerjaan yang sudah ada *committed* dan *rounding-up* atau pekerjaan yang sudah memasuki tahap penuntasan. Selain itu, Kementerian PUPR telah memulai dan menyelesaikan proyek strategis nasional dan proyek prioritas lainnya seperti bendungan, jalan tol, irigasi baru. Kemudian juga program Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau Kerakyatan seperti Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW, Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas.

Dalam rangka pencapaian target-target tersebut, kita sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, terutama penyiapan lahan maupun urusan perizinan.

Tahun 2017 merupakan tahun ke-3, dan pada tahun 2018 hanya tersisa dua tahun untuk memenuhi seluruh target-target pembangunan infrastruktur. Selain itu, *resource envelope* dan ruang fiskal yang kita miliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu, diharapkan dalam penyusunan program benar-benar dipertajam dan fokus untuk pencapaian target prioritas nasional.

### Apakah Pra Konreg merupakan bagian dari penyiapan RKP tahun anggaran 2018?, dan bagaimana Ibu melihat pelaksanaan Pra Konreg tersebut?

Iya, Pra Konreg bagian dari penyiapan RKP yang dilakukan Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2018, dan Pra Konreg merupakan forum yang harus dilakukan dalam rangka kita mendukung program pembangunan yang terpadu dan berangkat pada wilayah pengembangan strategis atau WPS. Banyak pihak turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pra Konreg ini, baik dari daerah maupun Kementerian

Penyusunan program Kementerian PUPR pada tahun 2018 dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan wilayah dengan melanjutkan pekerjaan yang sudah ada *committed* dan *rounding-up*

PUPR, dan ini harus kita tumbuhkan. Supaya kedepan hasil kerja kita lebih efektif dan tentu saja berujung pada efisiensi kerja.

#### **Apa yang menjadi fokus utama dari Pelaksanaan Pra Konreg?**

Fokus utama dari Pra Konreg ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tidak hanya ditanggung pemerintah pusat saja tapi juga pemerintah daerah. Jadi misalnya jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi jadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan jalan kabupaten-kota menjadi tanggung jawab kabupaten-kota. Jadi kalau tidak ada keterpaduan, maka ketika kita mau mengembangkan WPS dengan fokus pada kawasan industri, misalnya, akan terlihat pembangunan jalan nasional dan provinsi tidak sinkron.

Jadi bila kita memfokuskan pada pengembangan kawasan industri, maka pelabuhan harus kita bangun. Kemudian juga infrastruktur jalan seperti jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, kabupaten maupun kota. Semua harus dalam satu rencana yang terpadu untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih cepat dan pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### **Apa harapan ibu dari pelaksanaan Pra Konreg yang digelar di 4 kota ini?**

Pelaksanaan Pra Konreg sudah baik, dan tentunya saya berharap bisa lebih baik lagi. Misalnya Kepala Bappeda perlu hadir tanpa diwakili. Hal ini penting, karena pembahasan program pembangunan infrastruktur untuk tahun 2018 butuh kebijakan dari Kepala Bappeda.

#### **Bagaimana Ibu melihat peran BPIW dalam melakukan perencanaan pembangunan?**

Sebenarnya BPIW yang harus menterjemahkan arahan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Misalnya kita

mau mendukung Nawacita untuk meningkatkan daya saing, maka BPIW yang menentukan, program apa saja yang harus kita lakukan dalam merealisasikan dukungan tersebut. Kemudian bila kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka BPIW juga yang menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Kita dari Sekjen mengikuti perencanaan yang dibuat BPIW. Unit organisasi atau unsur lain juga harus ikut serta perencanaan yang dibuat BPIW tersebut.

Hal ini harus dilakukan, dikarenakan ada sistem pembangunan infrastruktur yang tidak terpisahkan. Kalau misalnya daerah tidak mendukung satu WPS, mungkin tidak tercapai pembangunan disitu. Jadi peran BPIW sangat penting sebagai *guidance* atau yang mengarahkan pembangunan di sektor-sektor. Misalnya kita akan mengembangkan kawasan industri, maka harus dilihat apakah suplai airnya cukup. Untuk itu harus ada keterlibatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Cipta Karya untuk penyediaan air bersih maupun air minum.

#### **Ada harapan Ibu terhadap BPIW?**

Saya sangat berharap BPIW mampu menterjemahkan arahan Presiden dalam bentuk perencanaan infrastruktur dan juga menghitung peran kita sebagai salah satu unit pembangun infrastruktur, agar kita dapat bekerja secara efektif. Apalagi kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi 5,75. Untuk itu BPIW harus bisa menghitung, pembangunan infrastruktur yang seperti apa yang menjadi prioritas, agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Fokus utama dari Pra Konreg ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tidak hanya ditanggung pemerintah pusat saja tapi juga pemerintah daerah.



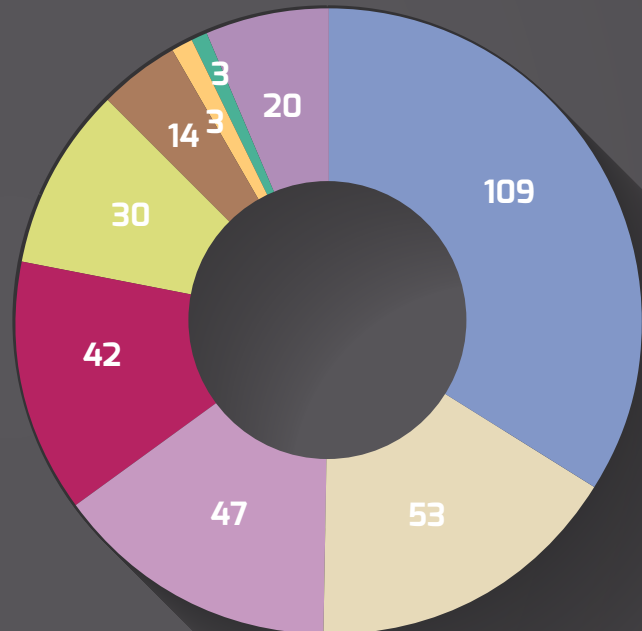
Saya sangat berharap BPIW mampu menterjemahkan arahan Presiden dalam bentuk perencanaan infrastruktur dan juga menghitung peran kita sebagai salah satu unit pembangun infrastruktur, agar kita dapat bekerja secara efektif.



# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan hal itu. Guntingan berita kami sarikan dari 6 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan. Selama bulan Maret 2017. Total ada 321 berita dari 7 media periode 1 Maret - 31 Maret 2017.

1	Pembangunan Jalan/ jalan tol/jembatan	109
2	pengembangan perkotaan/smart city/ kota pusaka	53
3	Perumahan/Rusun/Permukiman	47
4	Pembiayaan infrastruktur/ anggaran	42
5	Pengelolaan air/ sungai/Bendungan/sanitasi	30
6	Pembebasan lahan/pertanahan	14
7	penataan ruang	3
8	Pengembangan kawasan pariwisata	3
9	Lain-lain	20
Total		321



Pemberitaan pada bulan Maret 2017 totalnya mencapai 321 berita. Berita tersebut didominasi oleh pemberitaan pembangunan jalan tol, serta pembangunan jembatan yang mencapai 109 berita, dimana pemberitaan mengenai pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan Papua yang kerap diberitakan oleh Media Massa.



### Berita menarik yang berkaitan dengan pengembangan Infrastruktur PUPR, sepanjang bulan Maret 2017:

1. **Kamis, 2 Maret 2017, Investor Daily**, (Halaman 22)  
PUPR Bangun 200 Rusun di Papua Barat.  
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 200 unit rumah khusus (Rusus) untuk masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
2. **Senin, 6 Maret 2017, Investor Daily** (Halaman, 6)  
PUPR Kontrak 4.141 Paket Pekerjaan Senilai Rp 50 T.  
Hingga saat ini Kementerian PUPR telah merampungkan 4.141 paket pekerjaan kontraktual 2017.
3. **Selasa, 7 Maret 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 7)  
Kontrak Lelang Tuntas April.  
Kementerian PUPR menargetkan hingga pertengahan April kontrak seluruh paket pekerjaan tahun ini dapat ditandatangani.
4. **Kamis, 9 Maret 2017, Bisnis Indonesia** (Halaman, 7)  
Kaltara Butuh Konektivitas.  
Kementerian PUPR diminta tak hanya membangun jalan perbatasan, namun jalan yang menghubungkan sejumlah daerah di Provinsi Kaltara
5. **Senin, 13 Maret 2017, Investor Daily** (Halaman, 6)  
Bendungan Batangasai Senilai Rp 850M Segera dibangun.  
Menteri PUPR Mengatakan, pembangunan bendungan batangasai di kabupaten Sarolangun, Prov Jambi sudah bisa dilaksanakan pada 2017.
6. **Kamis, 16 Maret 2017, Bisnis Indonesia** (halaman 27)  
Rusunawa dibangun di Pasuruan.  
Kementerian PUPR akan membangun 2 Rumah Susun Sederhana sewa untuk para santri di pasuruan jatim.
7. **Senin, 20 Maret 2017, Investor Daily** (Halaman, 15)  
Jalan perbatasan Kalimantan akan bertambah 161 km.  
Kementerian PUPR menargetkan jalan perbatasan di Kalimantan bertambah 161,10 kilometer
8. **Selasa, 21 Maret 2017, Investor Daily** (Halaman, 6)  
PUPR Lanjutkan Bangun 7 PLBN Tahap II.  
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan tahap II, yakni zona sub-inti dan pendukung 7 PLBN di seluruh Indonesia.
9. **Sabtu-Minggu, 25-26 Maret 2017, Investor Daily** (Halaman, 6)  
Progres Konstruksi Tol Medan-Tebing Tinggi Capai 75%.  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan progress konstruksi jalan tol Medan – Kualanamu – Tebingtinggi telah mencapai 75%.
10. **Rabu, 29 Maret 2017, Media Indonesia** (Halaman, 24)  
1 April, Truk Bisa Lewat Cisomang.  
Kementerian PUPR memastikan perbaikan jembatan Cisomang akan selesai sebentar lagi.

# Temui Kepala BPIW, Tim PUG Kementerian PUPR Bahas Isu Gender

Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR bersama Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya, Baby S. Dipokusumo melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur

berharap BPIW dapat memasukkan program - program pembangunan infrastruktur yang responsif gender.

Sebagai pimpinan BPIW, Rido menyambut baik kunjungan tersebut. Apalagi PUG ini merupakan suatu kebijakan atau upaya pemerintah yang dikawal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kebijakan ini bertujuan memberikan pengertian kepada kita semua, bahwa gender ini menyangkut persamaan lelaki dan perempuan. Kemudian juga ditambahkan dengan lansia, balita, dan orang yang berkebutuhan khusus," tutur Rido

"Kebijakan ini bertujuan memberikan pengertian kepada kita semua, bahwa gender ini menyangkut persamaan lelaki dan perempuan. Kemudian juga ditambahkan dengan lansia, balita, dan orang yang berkebutuhan khusus," tutur Rido

Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan beserta jajarannya, di ruang rapat BPIW, Kamis (16/3). Baby mengatakan kedatangan timnya ini, untuk melakukan Koordinasi dan sosialisasi mengenai gender. Dari pertemuan ini, ia

tutur Rido.

Dalam kesempatan itu, Rido juga menyampaikan bahwa untuk beberapa hal, seperti gedung BPIW telah memberikan sarana yang bersifat responsif gender.



Pertemuan bahas isu gender



Kebersamaan usai rapat membahas masalah gender.

Sumber: Dok. BPIW

Sarana tersebut dalam bentuk kondisi trotoar jalan di depan gedung yang dibuat landai sehingga mudah dilewati masyarakat yang menggunakan kursi roda maupun anak-anak.

“Kita sudah memperhatikan isu gender tersebut. Namun yang kini diharapkan adalah bahwa kita juga melakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG. Mengenai hal ini memang perlu diskusi lebih lanjut, apakah PPRG ini maksudnya adalah dana khusus untuk gender atau kegiatan sudah responsif gender. Bila orang yang melakukan perencanaan merupakan ada perempuan, maka sudah responsif gender,” ucapnya.

Menurut Rido, dalam melakukan perencanaan, BPIW telah responsif gender. Dicontohkannya dalam melakukan survei ke lapangan dalam rangka membuat *masterplan* dan *development plan*, BPIW meminta masukan dari para wanita untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Salah satu Anggota Tim Sekretariat PUG-

PUPR, Lilla Norhayati juga berharap untuk beberapa program, BPIW dapat melakukan PUG. Ia melihat peluang itu ada, terutama pada program Anjungan Cerdas, baik di Trenggalek (Jawa Timur) dan Rambut Siwi (Bali).

Menurut Lilla, dalam perencanaan Anjungan

orang,” tegasnya. Pertemuan ini juga dihadiri anggota tim PUG-PUPR lainnya yakni Adi Sasutji dan Ineke Indra. Beberapa staf BPIW yang kebanyakan perempuan juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. **Hen/ infobpiw**

## Salah satu Anggota Tim Sekretariat PUG-PUPR, Lilla Norhayati juga berharap untuk beberapa program, BPIW dapat melakukan PUG.

Cerdas tersebut, dapat dibuatkan sarana dan prasarana seperti taman yang dapat dinikmati orang berkebutuhan khusus, lansia, dan anak-anak. “Sarana berupa toilet juga bisa dibuatkan yang nyaman untuk mereka. Jadi pada prinsipnya, *infrastructure for all* atau infrastruktur untuk semua

# Pengembangan Infrastruktur PUPR di KPPN Perlu Sesuai Kebutuhan

Skala prioritas dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti mengacu pada kebutuhan setiap Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai karakteristiknya. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menyampaikan arahan dalam "Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pengembangan KPPN Tahun 2017" di Jakarta, Senin, (13/3).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) serta pemerintah kabupaten (Pemkab) lokasi 10 KPPN yang akan disusun masterplannya pada 2017.

Rido menerangkan, posisi dukungan infrastruktur PUPR dalam pengembangan KPPN dapat berada di depan atau pertengahan. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap KPPN. "Jangan sampai dukungan infrastruktur PUPR dilakukan di depan atau awal-awal, namun tak semua infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal akibat tak sesuai kebutuhan KPPN," papar Rido.

Selain itu, Rido mengatakan, dalam



*Usai rapat pembahasan KPPN*

melakukan perencanaan pengembagn KPPN harus efektif sekaligus mampu meningkatkan perekonomian. Dengan begitu dukungan perlu diarahkan agar masyarakat perdesaan mampu meningkatkan nilai tambah.

"Misalnya, kalau sebelumnya masyarakat menjual bahan mentah dari potensi yang

ada di perdesaannya. Ke depan diharapkan masyarakat akan mampu mengolah bahan baku sebelum dijual ke pasar, agar tercipta peningkatan nilai tambah," terangnya.

Rido juga menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan penguatan terhadap



40 KPPN. Dukungan dari Kementerian PUPR dimulai dengan penyusunan dokumen masterplan hingga aksi pengembangan infrastruktur di kawasan KPPN.

Dokumen masterplan pengembangan KPPN merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku pembangunan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil

sebanyak 2 KPPN  
la menjelaskan, masterplan KPPN disusun

Rido mengatakan, dalam melakukan perencanaan pengembangan KPPN harus efektif sekaligus mampu meningkatkan perekonomian.

melalui beberapa tahapan, mulai survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian,

pemangku pembangunan dalam upaya mengembangkan KPPN, sehingga dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Sementara itu, M Sumedi dari Bappenas mengatakan, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan terdapat 40 KPPN. Pada tahun 2015 dan 2016 telah terfasilitasi untuk penyusunan 30 KPPN, sehingga pada 2017 dilakukan fasilitasi terhadap 10 KPPN.

la berharap, para pemangku pembangunan dapat bersama-sama mendukung terwujudnya masterplan 10 KPPN. "Dengan begitu, pada 2017 ini akan tercipta 10 masterplan. Artinya, pada 2017 telah terpenuhi mandat RPJMN 2015-2019 mengenai pengembangan dan penguatan terhadap 40 KPPN," jelasnya. **(Cin/Ris/infoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

dan Perdesaan, BPIW, Sanusi Sitorus mengatakan, pada tahun 2016 telah berhasil disusun masterplan 14 KPPN oleh beberapa kementerian.

Misalnya, lanjut Sanusi, Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun masterplan 4 KPPN, Kementerian PDTT menyusun masterplan 6 KPPN, dan Kementerian ATR

kunjungan lanjutan untuk penajaman informasi kawasan.

"Selain itu, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjangkau masukan dari daerah, guna penyempurnaan draft masterplan yang tengah disusun," terangnya.

Rapat koordinasi ini, lanjut Sanusi, diharapkan tercipta kesamaan visi dari seluruh

# Dharma Wanita Persatuan BPIW Adakan Sosialisasi SPAK

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR melakukan pertemuan 4 bulanan, di ruang rapat BPIW, Selasa (14/3). Kepala Dharma Wanita

Persatuan BPIW, Yurida Rido mengatakan pertemuan rutin kali ini diisi dengan sosialisasi gerakan yang disebut Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Dikatakan, sosialisasi anti korupsi bagi anggota Dharma Wanita tersebut bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa.

“Sosialisasi SPAK ini dalam rangka mendukung kerja

DWP Kementerian PUPR tahun 2017 dan juga melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP BPIW,” jelas istri Kepala BPIW Rido Matari Ichwan itu.

Tujuan dari sosialisasi menurutnya untuk

mengenalkan SPAK, karena SPAK hakikatnya merupakan pendidikan moral yang mengajarkan anti korupsi berbasis keluarga. “SPAK mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi SPAK ia berharap, para anggota DWP yang merupakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mendukung para suami agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja pada Kementerian PUPR yaitu rasional, kerjasama tim, inovasi, efisiensi, efektifitas, responsif dan kemitraan.

“Kita sebagai perempuan memiliki kekuatan dibalik kelembutan kita, dan kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai kejujuran dan mengingatkan kepada suami agar mereka bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi. Dalam slogan SPAK juga disebutkan bahwa kekuatan perempuan merupakan inspirasi perubahan,” ucap Yurida Rido.

Kegiatan sosialisasi ini menurutnya

---

“Sosialisasi SPAK ini dalam rangka mendukung kerja DWP Kementerian PUPR tahun 2017 dan juga melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP BPIW,” jelas istri Kepala BPIW Rido Matari Ichwan itu.

---



Paparan mengenai program Saya Perempuan Anti Korupsi

Sumber: Dok. BPIW

penting, agar DWP BPIW juga dapat membantu memperbaiki citra pegawai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain itu juga untuk ikut serta dalam mewujudkan program revolusi mental pemerintah. "Semoga kita semua mampu menjadi agen-agen perubahan yang mengubah Indonesia ke arah lebih baik lagi, dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran tanpa lelah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu diisi dengan paparan dari Agen SPAK, Riana Syarif. Dalam paparannya Riana mengatakan, sosialisasi anti korupsi ini dilakukan agar setiap insan BPIW dapat menjadi manusia yang lebih baik. Diakuinya terkadang tanpa disadari, apa yang dilakukan beberapa kalangan bersentuhan dengan tindakan korupsi. Dengan kegiatan ini ia berharap semua orang dapat mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan untuk menghindari perbuatan yang dapat

dikategorikan korupsi. Acara sosialisasi ini diisi dengan games anti korupsi yang diikuti seluruh anggota.

Disela-sela sosialisasi, juga dilakukan acara pisah sambut, dimana anggota DWP

memberikan kesan-kesannya selama bergabung di DWP BPIW.

Selanjutnya diisi juga perkenalan anggota DWP BPIW yang baru, yakni Diyah Bobby (istri dari Bobby Prabowo, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR) dan Ati Iwan (istri dari Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR). Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. **(Hen/INI/infobpiw)**

**Dalam paparannya Riana mengatakan, sosialisasi anti korupsi ini dilakukan agar setiap insan BPIW dapat menjadi manusia yang lebih baik.**

BPIW, yaitu Inar Suminarsih (istri Rezeki Peranginangin, mantan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis) dan Dewi Sulisty (istri Harris Hasudungan Batubara, mantan Kepala Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR,

# Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan serah terima jabatan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kantor BPIW, Jakarta (10/03).

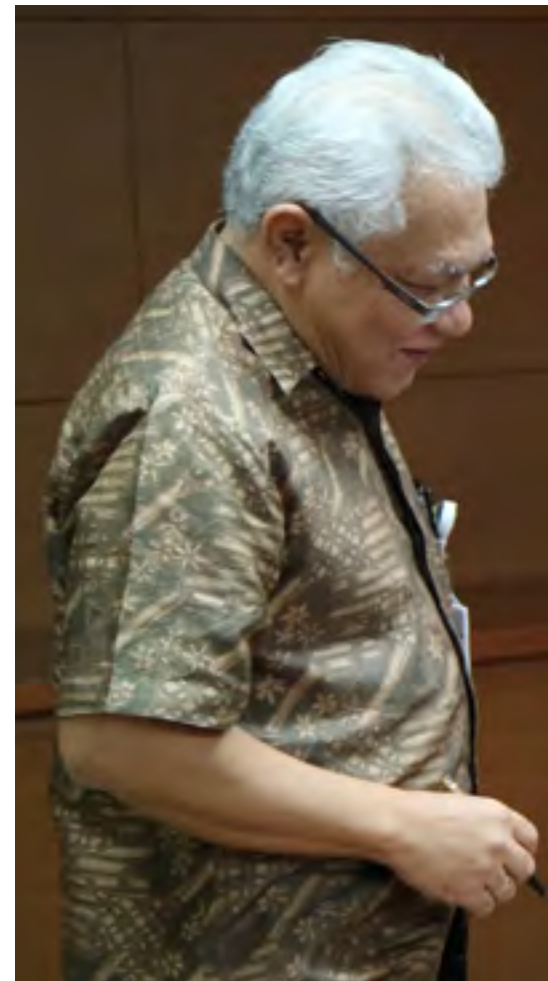
Serah terima jabatan dilakukan oleh Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Periode 2015-2017, Harris Hasudungan Batubara

kepada Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang baru, Iwan Nurwanto.

Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung

Dalam sambutannya, Rido mengatakan, pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pematapan organisasi

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan disaksikan segenap jajaran pejabat di lingkungan BPIW. Dalam sambutannya, Rido mengatakan, pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih



diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pematapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada bangsa dan negara.

Rido mengucapkan selamat menjalankan

tugas di tempat baru kepada Harris Hasudungan Batubara, teriring apresiasi dan ucapan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai selama ini.

“Dengan pengalaman yang saudara miliki, saya berharap saudara senantiasa dapat memberikan masukan yang positif dan konstruktif serta dapat membagi pengalaman yang dimiliki kepada khususnya generasi muda penerus Kementerian PUPR” ujar Rido

“Kepada saudara Iwan Nurwanto, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar BPIW. Semoga pengalaman saudara memberikan warna baru dan mampu memberikan yang

dapat berjalan lancar sesuai dengan yang

“Kepada saudara Iwan Nurwanto, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar BPIW. Semoga pengalaman saudara memberikan warna baru dan mampu memberikan yang terbaik guna mendukung pencapaian kinerja BPIW,” lanjutnya.

direncanakan.

Menurutnya, Pra Konreg diharapkan

Rido berpesan kepada para Pejabat Tinggi

Pratama agar dipahami bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh BPIW adalah menyiapkan program jangka menengah dan tahunan yang berkelanjutan dan berbasis kewilayahan.

Setiap Pusat, lanjutnya, memiliki peran yang berkesinambungan terhadap Pusat lainnya,

sehingga dibutuhkan kerja sama saling mengisi antar Pusat dan sinergitas hasil



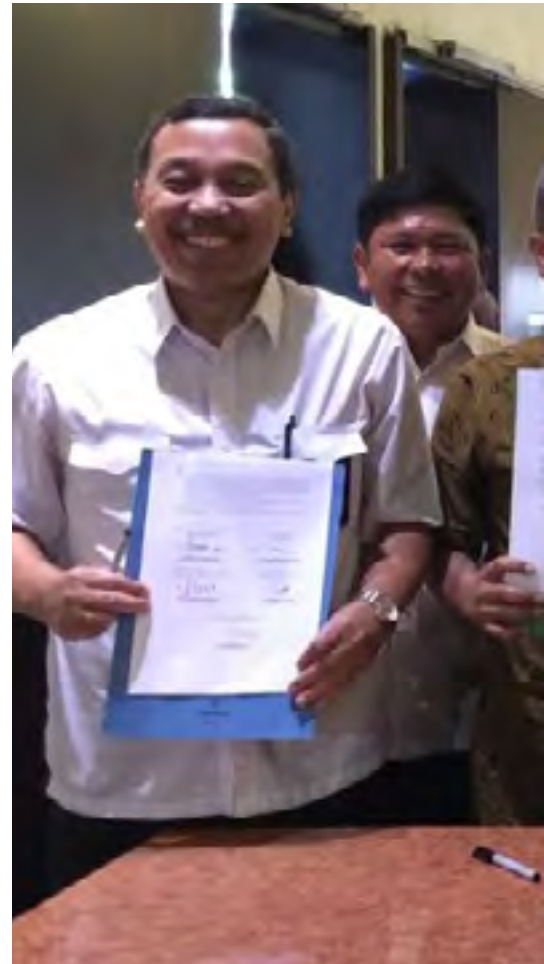
terbaik guna mendukung pencapaian kinerja BPIW” lanjutnya.

la mengungkapkan, BPIW saat ini sedang melaksanakan pekerjaan besar yaitu Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Rido berharap, kegiatan Pra Konreg tetap

mampu memberikan kerangka sinkronisasi program yang memadukan program prioritas nasional pengembangan wilayah dan infrastruktur PUPR dengan program prioritas pemerintah daerah untuk semakin dipertajam pada proses berikutnya.

kerja maupun semangat bekerjasama dari tingkat staf sampai pimpinannya di dalam dan antar Pusat dan Sekretariat Badan. **(bri/ infoBPIW)**

# Lima Kementerian Lakukan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN



Kesepakatan pembagian kewenangan penyusunan KPPN

Penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

BPIW Kementerian PUPR telah membuat *Masterplan* dan *Pra Detail Engineering Design (DED)* 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), di tahun 2016. Empat KPPN

itu yakni Daruba, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan. Pada tahun 2017 ini *Masterplan* dan *Pra DED* KPPN juga akan dibuat lima Kementerian, salah satunya Kementerian PUPR melalui BPIW.

Untuk itu dilakukan

Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN tersebut.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan *Masterplan* Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019.

Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan di Jakarta, Selasa (7/3).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kemen PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan



Sumber: Dok. BPIW

perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang selanjutnya disebut sebagai KPPN.

Kemudian, lanjut Agusta, KPPN yang harus ditangani periode 2015-2019 terdiri dari 40 pusat pertumbuhan. "Lokasi-lokasi KPPN telah diusulkan Bappenas dan selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 667/D. VII/MDK.00.02/05/2016 Tanggal 9 Mei 2016 mengenai Target Nasional dalam RKP 2017 tentang Desa dan Kawasan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan," paparnya. Ia mengatakan, Masterplan untuk KPPN mesti disusun secara partisipatif dan difasilitasi Kementerian PUPR, Kementerian

**Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa**

ATR, Kementerian Desa PDTT di bawah koordinasi Kementerian Koordinator PMK dan Bappenas.

"Masterplan yang disusun akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana

Pembangunan Kawasan Perdesaan. Masterplan juga menjadi acuan implementasi pembangunan kawasan perdesaan bagi Pemerintah Pusat serta pihak terkait," paparnya. Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019 ini dilakukan pejabat eselon 2 dari Kementerian/Lembaga terkait. ([cindy/infoBPIW](mailto:cindy/infoBPIW))

# Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi



Pengembangan kota di Indonesia dilakukan secara terintegrasi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan integerasi yang dilakukan dengan kerja sama antar kota dalam satu wilayah seperti Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjar Bakula atau disebut juga Metropolitan Banjarmasin Raya. Kawasan Banjar Bakula ini

menghubungkan lima daerah yaitu Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan sebagian Kabupaten Tanah Laut. Luas kawasan Banjar Bakula ini diperkirakan mencapai 340.446 hektar atau 9,07 persen luas wilayah Kalsel.

“Pengembangan kota di Indonesia yang terintegrasi ini banyak dilakukan, seperti juga halnya dengan Jabodetabek dimana melibatkan Provinsi DKI Jakarta,





Pembangunan infrastruktur jalan Tol.

Banten dan Jawa Barat,” ujar Rido, saat berbicara di acara Bedah Buku “Kota Layak Huni”, di Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.

Dalam kaitannya dengan hal itu menurut Rido, BPIW berperan dalam menyusun perencanaan dan program untuk kawasan perkotaan terutama didalam Kawasan Pengembangan Strategis (WPS). “Perencanaan seluruh kawasan termasuk perkotaan, kita padukan dan sinkronkan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* baik pusat maupun daerah dalam Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg,” ungkap Rido.

Ditempat terpisah, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan untuk kawasan metropolitan ada 5 metropolitan baru. Kelima metropolitan

baru itu adalah Banjarmasin, Manado, Padang, Palembang Raya, dan Mataram. Kemudian dari lima metropolitan baru, yang telah diselesaikan *masterplannya* pada tahun 2016 adalah Palembang

“Pengembangan kota di Indonesia yang terintegrasi ini banyak dilakukan, seperti juga halnya dengan Jabodetabek dimana melibatkan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Rido

Raya dan Manado. Kemudian tahun 2017 direncanakan diselesaikan *masterplan* 1 metropolitan baru yaitu Banjarmasin. Tahun 2018 akan diselesaikan *masterplan* Padang dan Mataram. “Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah mengikuti bisnis proses yang ada

di BPIW yakni memasukkan masterplan ke Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Selanjutnya diserahkan ke Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Dari pusat ini nantinya akan menghasilkan program kegiatan,” ungkap Agusta. Kemudian dilakukan Pra Konreg bersama unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Pra Konreg ini akan menghasilkan *shopping list* atau daftar belanja infrastruktur

untuk tahun 2018. **Hen/infobpiw**

# Kepala BPIW: Program pembangunan Infrastruktur PUPR Harus Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017

Program-program pembangunan infrastruktur PUPR harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas". Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Rabu (1/3).

---

Langkah-langkah yang harus diterapkan menurut Rido, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri.

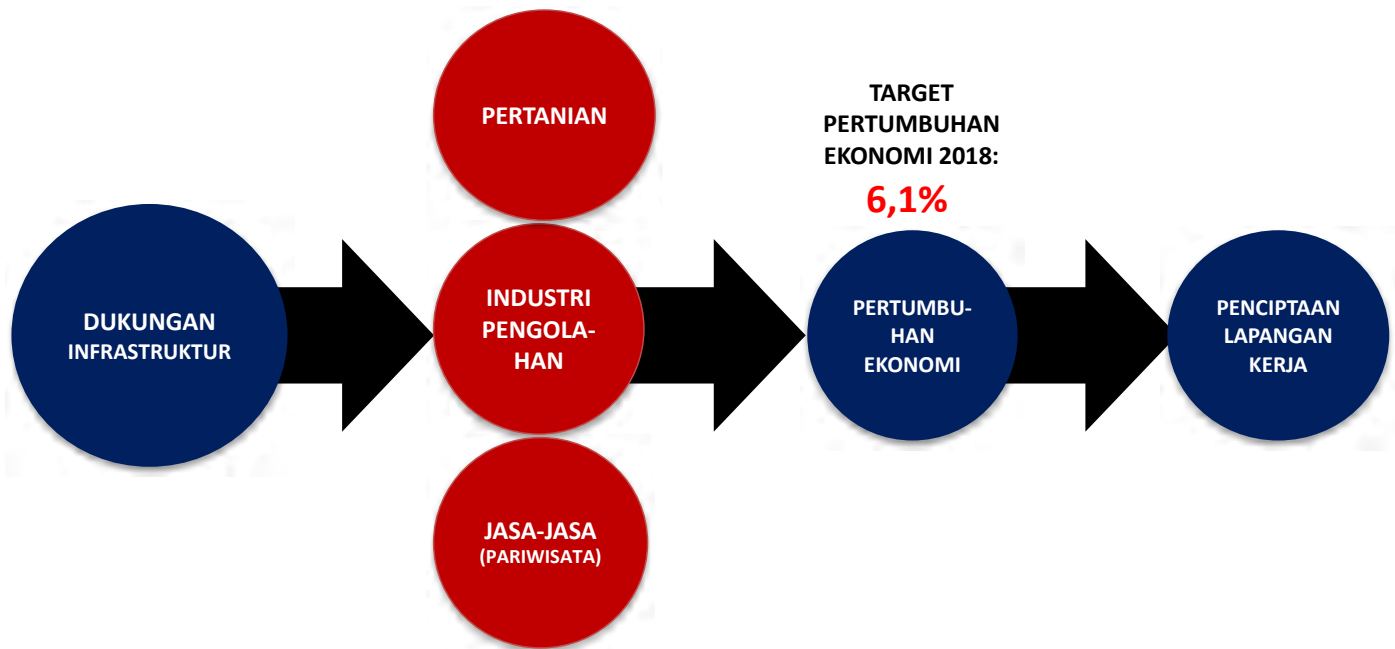
---

Untuk itu, langkah-langkah yang harus diterapkan menurut Rido, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

Hal ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk

"Selain itu, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional.

## KERANGKA LOGIS PRIORITAS NASIONAL DALAM EKONOMI SISI PENAWARAN



### Sumber: Prakiraan Bappenas

Langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan *money follow* program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah nyata dalam mendukung rencana kerja pemerintah pusat tersebut, menurut Rido, BPIW melakukan penajaman program infrastruktur, mulai dari penajaman metodologi penyusunan rencana hingga penyusunan program. Hal ini dilakukan supaya program-program yang dilakukan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Rido juga menyatakan bahwa penajaman dilakukan dengan strategi perencanaan sesuai dengan Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS). “Kita jalankan penajaman berdasarkan *standard operating procedure* atau SOP yang ada,” tegas Rido.

**Kita akan matangkan skema pelaksanaan Pra Konreg dan Konreg yang dilaksanakan pada Bulan Maret ini, agar menjadi aturan baku dalam hal sistem pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR,” tegas Rido**

Disisi lain Rido juga menekankan beberapa hal seperti penyelesaian *integrated masterplan* 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara),

Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Selain itu perhatian Rido pada percepatan penetapan dokumen review

Rencana Strategis atau Renstra PUPR dan pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konsultasi Regional (Konreg). “Kita akan matangkan skema pelaksanaan Pra Konreg dan Konreg yang dilaksanakan pada Bulan Maret ini, agar menjadi aturan baku dalam hal sistem pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR,” tegas Rido.

Hen/infobpiw

# Perlu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja. Hal ini sejalan dengan tujuan awal penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan para pengembang di sekitar kawasan Kota Baru Publik Maja. Demikian ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matarichwan dalam rapat "Monitoring Percepatan Pembangunan Kawasan Kota Baru Publik Maja," di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (2/3).

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas), beberapa pengembang serta perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Kawasan Kota Baru Publik Maja.

Pada tahun 2016 Kementerian PUPR telah menginisiasi penandatanganan kesepakatan bersama, yang esensinya antara lain Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat rencana induk atau masterplan Kota Baru Publik Maja, perencanaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja.

Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov)



*Rapat pembahasan Kota Baru Publik Maja*

Jawa Barat (Jabar) dan Banten memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan lokasi (Penlok) ruas jalan akses Maja. Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, fasilitas perizinan pengembangan Kota Baru Publik Maja.

"Melalui kegiatan ini PUPR berharap ada percepatan dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja yang telah digagas sejak tahun 1994. Saya sendiri sudah turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan perkembangan apa yang sekarang sudah dan sedang berjalan dalam rangka perwujudan kota baru ini." terang Rido.

Pengembangan Kota Baru Publik Maja merupakan satu dari sepuluh rencana pengembangan kota baru yang tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat mewujudkan komitmen dan tugas sesuai kewenangannya dalam mewujudkan Kota Baru Publik Maja.

Menurutnya, posisi Kota Baru Publik Maja berada di kawasan strategis karena berada diantara dua Wilayah

Pengembangan Kota Baru Publik sesuai RPJMN 2015-2019 terdapat 10 kota, yakni

**“Melalui kegiatan ini PUPR berharap ada percepatan dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja yang telah digagas sejak tahun 1994. Saya sendiri sudah turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan perkembangan apa yang sekarang sudah dan sedang berjalan dalam rangka perwujudan kota baru ini,”** terang Rido.

Padang, Palembang, Maja, Pontianak, Pekanbaru, Tanjung Selor, Makassar, Manado,

terus menjalankan komitmen dalam pengembangan kota baru, agar ada kota baru yang segera menjadi percontohan,” ucapnya.

Ia berharap, Kota Baru Publik Maja akan menjadi percontohan bagi kota baru publik yang kawasannya berada di lintas provinsi. Sedangkan, Kota Baru Publik Pontianak menjadi percontohan bagi kota baru publik yang kawasannya berada dalam satu provinsi.

Kementerian PUPR telah memprogramkan dukungan infrastruktur PUPR berupa, rencana pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Serpong-Balaraja, pembangunan jalan Pamulang. Pemkab dan Pemkot tersebut, lanjutnya, mesti melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah MBR. “Kemudian para pengembang pembangunan berkewajiban melakukan penyediaan lahan untuk pembangunan dan peningkatan jalan akses Maja, melakukan pembangunan rumah untuk MBR bersubsidi yang memperhatikan pola hunian berimbang,” jelasnya. Agusta menerangkan, keberadaan sebuah kota baru publik dapat berfungsi sebagai penyangga kota besar di sekitarnya, sekaligus sebagai kota baru mandiri di sekitar kota besar yang telah ada. **(ris/infoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 7 yang meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi serta WPS 9 yang meliputi Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menambahkan,

Sorong dan Jayapura serta 4 kota baru tambahan yaitu, Sei Mangkei, Kemayoran, Bandar Kayangan, dan Sofifi.

Sampai saat ini, lanjut Agusta, dari semua yang direncanakan masih perlu dikembangkan lagi secara lebih optimal “Dengan begitu, kita akan terus mendorong para pemangku kepentingan



## Membumikan NUA, Membangun Kota Layak Huni

*Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau Konferensi Habitat III telah diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 2016 lalu. Konferensi tersebut dihadiri perwakilan 197 negara anggota PBB dan menyepakati untuk mengadopsi New Urban Agenda (NUA)/Agenda Baru Perkotaan yang merupakan dokumen hasil konferensi tersebut.*

NUA merupakan cetak biru landasan pembangunan perkotaan dalam mendukung 2030 Agenda on Sustainable Development, khususnya *Sustainable Development Goal II* yakni menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Indonesia berkomitmen mengadopsi dokumen NUA. Bahkan, Indonesia mengharapkan NUA dapat membantu mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi perkotaan di Indonesia.

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, delegasi Indonesia pada Konferensi PBB tersebut diwakili oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya, Lana Winayanti, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Deputi Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Arifin Rudiyanto.

"Agenda Baru Perkotaan atau NUA disepakati untuk 20 tahun kedepan sebagai panduan dalam pembangunan perkotaan dunia," ungkap Rido dalam rapat "Membumikan NUA di Indonesia" di Kantor BPIW, beberapa waktu lalu. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Indonesia berkepentingan menyelenggarakan kesepakatan NUA

dalam arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan, yakni berupaya menciptakan kota-kota menjadi lebih aman, inklusif, tangguh atau berdaya tahan terhadap bencana dan berkelanjutan.

Kota, lanjut Rido, memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan. Sebab, Kota merupakan mesin pertumbuhan dan sekaligus pusat kreativitas.

"Suksesnya pelaksanaan amanat NUA membutuhkan kolaborasi dari berbagai aktor pembangunan perkotaan. Oleh karenanya, perlu membumikan arahan NUA dalam membangun kota di Tanah Air, dengan bentuk tersosialisasikannya amanah NUA kepada para pemangku pembangunan di Indonesia," terangnya. Di tempat yang sama, Lana Winayanti mengatakan, kesepakatan NUA telah memberikan panduan untuk kota yang dirancang agar baik di masa depan.

"Dalam hal ini kepala daerah, khususnya

walikota dan bupati memiliki peran strategis dalam pelaksanaan NUA tersebut," ujarnya.

NUA juga mengangkat pentingnya peran generasi muda dan universitas sebagai pelaku prioritas. "Meningkat keduanya akan mewarisi kondisi perkotaan masa depan," jelas Lana. Selain itu, NUA juga membuka peluang yang lebar untuk mencapai kesejahteraan dan harapan yang lebih baik di masa depan.

Salah satunya, Urbanisasi akan menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan apabila dikelola dengan baik.

Lana menambahkan, Indonesia memang perlu mengadopsi NUA

## NUA merupakan cetak biru landasan pembangunan perkotaan dalam mendukung 2030 Agenda on Sustainable Development.



Pembahasan seputar New Urban Agenda

Sumber: Dok. BPIW



sesuai dengan karakteristik masing-masing kotanya. Terlebih, lahirnya NUA ini memiliki kedekatan dengan Indonesia. Sebab, NUA yang disepakati di Quito cikal bakalnya merupakan hasil Konferensi Habitat III 2016 di Kota Surabaya, Jawa Timur

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Sinulingga menyatakan, diperlukan sosialisasi mengenai NUA yang merata kepada kepala daerah di seluruh Tanah Air, agar tercipta kesepahaman yang sama dalam menata kota ke depan.

Selain itu, lanjutnya, ke depan perlu juga dilakukan penguatan tata kelola kota, perencanaan dan perancangan dan pembiayaan pembangunan permukiman dan perkotaan dalam rangka menjamin keadilan dan keberlanjutannya.

Menurutnya, saat ini yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi kesepakatan NUA. "BPIW kini tengah menyusun terjemahan naskah NUA untuk dapat dijadikan buku saku para pemangku

pembangunan," terang Agusta. Ia berharap, buku saku tersebut akan segera selesai disusun, sehingga dapat segera disosialisasikan dan didistribusikan ke daerah. "Dengan begitu, diharapkan aktor-

**"BPIW kini tengah menyusun terjemahan naskah NUA untuk dapat dijadikan buku saku para pemangku pembangunan," terang Agusta.**

aktor pembangunan di daerah memiliki pemahaman dan visi yang sejalan mengenai NUA," kata Agusta.

Dalam bedah buku "Kota Layak Huni" yang digelar BPIW di lingkungan Kementerian PUPR, Pakar Perencanaan Tata Kota ITB, Prof. Roos Akbar menuturkan, saat ini dinamika perubahan kota terjadi dengan sangat cepat. Untuk itu perlu adanya perencanaan khusus dalam menciptakan kota yang aman, inklusif,

tangguh atau berdaya tahan terhadap bencana dan berkelanjutan.

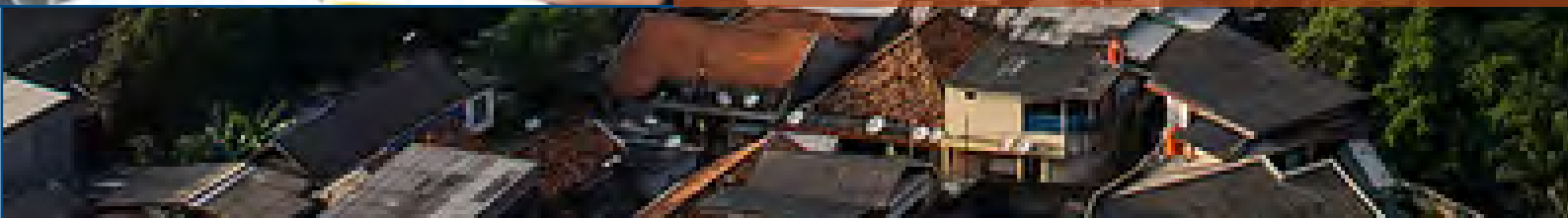
"Kemudian hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan kota adalah kesinambungan, karena pengembangan kota merupakan proses yang lama," tukasnya. **(ris/infoBPIW)**







Agenda Baru Perkotaan  
atau NUA disepakati untuk  
20 tahun kedepan sebagai  
panduan dalam pembangu-  
nan perkotaan dunia.



# Isu Disparitas Masih Relevan di Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali



**Benny Hermawan, ST, M.Sc**

*Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I (Wilayah Sumatera dan Jawa Bali)  
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR*

*Bila kita bicara soal disparitas, maka hal itu merupakan isu klasik yang sudah dibicarakan para ahli sejak dulu, baik aliran ekonomi klasik maupun neo klasik, bahkan sampai saat ini terus menjadi pembicaraan. Isu ini kembali ramai dibicarakan akhir-akhir ini, ketika dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden menyampaikan bahwa meskipun ekonomi nasional tumbuh, daya saing global membaik, dan angka indeks sedikit mengecil, namun disparitas masih terjadi. Dengan kondisi tersebut maka upaya pemerataan pembangunan masih perlu menjadi perhatian disamping upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan berbagai paket kebijakan ekonomi.*

Upaya pemerataan pembangunan juga masih sangat penting mengingat presentase penduduk miskin masih cukup tinggi. Menurut saya, memang disparitas secara alamiah memang akan terjadi dalam setiap proses pembangunan. Ada yang berpandangan bahwa masalah disparitas ini susah dihilangkan sampai titik nol, karena disparitas merupakan hukum alam, dimana investasi itu selalu menuju tempat-tempat yang memberi nilai tambah paling tinggi.

Bila ada tempat-tempat yang disukai karena memiliki nilai tambah, maka ada tempat-tempat yang tidak disukai karena tidak memberikan nilai tambah. Bila terjadi demikian, maka terjadi disparitas. Apalagi suatu kawasan itu tidak pernah statis, tapi selalu dinamis. Hal ini disebabkan demand yang terus berubah. Perubahan demand ini juga disebabkan beberapa hal seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, bencana alam, anggaran, dan teknologi. Jadi suatu kawasan itu pasti akan berubah. Dengan demikian, isu disparitas masih relevan, bahkan tidak terbatas disparitas antar wilayah. Perbedaan pendapatan antar

golongan dan perbedaan pendapatan penduduk di kawasan perkotaan dan perdesaan juga perlu menjadi perhatian bersama.

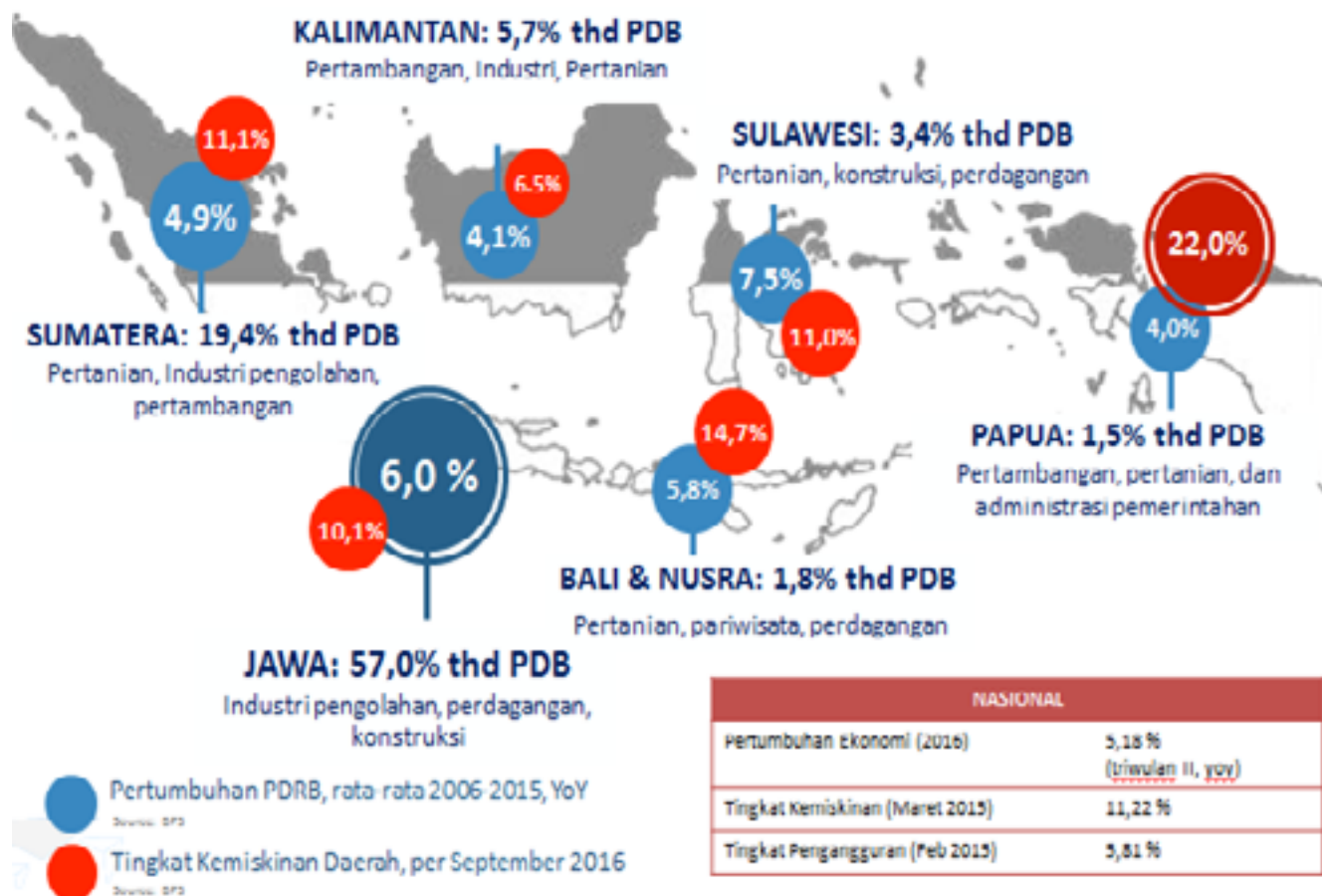
Dalam perspektif infrastruktur PUPR, disparitas juga dapat dilihat dari perbedaan tingkat layanan yang diterima baik antar daerah/wilayah,

antar golongan dan individu, dan antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Kepadatan jaringan jalan per luas wilayah, dan cakupan layanan air bersih di wilayah Barat tentu akan lebih besar dibandingkan di wilayah timur.

Cakupan layanan air bersih perpipaan dan atau air bersih non perpipaan yang terlindungi di perkotaan akan lebih baik dibandingkan kawasan perdesaan. Kualitas hunian golongan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) masih dijumpai tidak memenuhi standar layak huni dan bahkan sebagian masyarakat

MBR ini belum memiliki hunian bahkan tidak memiliki akses pembiayaan untuk memiliki hunian. Hal ini berbeda kondisi dengan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi, yang relatif sudah memiliki hunian sesuai standar layak huni dan bankable.

**Isu disparitas masih relevan, bahkan tidak terbatas disparitas antar wilayah. Perbedaan pendapatan antar golongan dan perbedaan pendapatan penduduk di kawasan perkotaan dan perdesaan juga perlu menjadi perhatian bersama.**



Gambaran Disparitas Antar Kawasan



*Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat*

Secara normatif, isu disparitas ditangani dengan upaya-upaya pemerataan pembangunan. Langkah awal tentunya tetap mendorong dukungan infrastruktur PUPR secara terpadu di 35 wilayah pengembangan strategis (WPS). Diharapkan WPS-WPS ini akan menjadi pusat pertumbuhan yang mengukit pertumbuhan kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah di sekitarnya. Selain dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada 35 WPS tersebut, isu disparitas dapat dilakukan dengan melakukan upaya pemenuhan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal, baik antar wilayah, antar golongan maupun di kawasan perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian, setiap hunian di kawasan perdesaan maupun di beberapa bagian kawasan perkotaan harus memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Demikian pula, hunian untuk MBR harus sesuai dengan SPM yang disepakati.

Kementerian PUPR sejak lama sudah merespon isu disparitas dan pemerataan ini. Dalam perspektif disparitas antara wilayah barat dan timur, lima tahun lalu sudah mulai dirintis pembangunan Trans Papua secara bertahap. Dalam beberapa tahun kedepan, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendorong Trans Papua agar bisa fungsional, akses dan konektivitas pada kawasan perbatasan negara baik di

Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur juga bisa fungsional.

Dalam perspektif disparitas antar wilayah di Sumatera dan Jawa telah dilakukan beberapa perbaikan seperti konektivitas di selatan Jawa melalui pembangunan secara bertahap jalan lintas selatan Jawa, perbaikan konektivitas di pantai barat Sumatera, dan perbaikan

**Masterplan yang kita buat melihat masalah yang ada, potensi, dan juga daya dukung suatu kawasan. Dengan melihat berbagai aspek ini, maka pembangunan infrastruktur yang kita lakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan.**

konektivitas dari utara – selatan Jawa agar pusat-pusat produksi pada daerah-daerah di selatan Jawa bisa lebih aksesible menuju pusat-pusat distribusi atau pasar yang relatif terpusat di utara Jawa. Dalam perspektif disparitas pendapatan dan pengentasan kemiskinan, Kementerian PUPR juga telah melakukan program-program perbaikan pelayanan dasar, perbaikan perumahan kumuh melalui program Kotaku (kota tanpa

kumuh), penyediaan rusunawa di perkotaan dan kawasan industri.

Isu disparitas tidak terbatas hanya antara wilayah barat dan timur Indonesia, bahkan di wilayah Sumatera, Jawa Bali yang relatif sudah berkembang kedua isu tersebut masih sangat relevan dan perlu diberikan perhatian. Apalagi, hal tersebut terkait dengan keberlanjutan kehidupan sekitar 80 persen penduduk dan kegiatan ekonomi nasional.

Walaupun belum terpetakan dengan baik dan muktahir, beberapa dokumentasi menunjukkan bahwa disparitas di Jawa Bali terjadi antara daerah-daerah di bagian utara dan selatan, sementara di Sumatera terjadi antara daerah-daerah di bagian timur dan barat. Disparitas ini secara kasat mata ditunjukkan dengan aglomerasi perkotaan, kawasan industri, ketersediaan infrastruktur baik pelabuhan, jalan, bandara, serta relatif baiknya tingkat pendapatan, indeks pembangunan manusia, prosentase penduduk miskin, dan tingkat layanan dasar pada daerah-daerah tersebut.

Kalau bicara pengembangan Pulau Sumatera dan Jawa, ada filosofisnya. Bila kita mengembangkan Jawa, filosofisnya adalah kita 'menjaga' Jawa. Maksudnya, dengan kondisi Jawa yang berkembang, maka bagaimana kita menjaga aset ekonomi maupun infrastruktur agar tetap berfungsi optimal tanpa merusak lingkungan.

Pulau Jawa juga memiliki banyak kawasan industri, lumbung pangan yang besar, dan tingkat produktifitas sawah yang jauh lebih bagus dibandingkan tempat lain di Indonesia. Sementara tekanan lingkungan dan konvensi lahan juga tinggi. Sedangkan jumlah penduduk dan perkotaan yang terus tumbuh.

Kemudian, bila kita mengembangkan Sumatera, filosofinya adalah bagaimana kita mendorong potensi yang ada untuk tumbuh, tapi

pengembangan yang dilakukan tidak mengganggu lingkungan. Pulau Sumatera masih banyak memiliki produksi pertambangan dan hasil bumi. Produksi dari pulau tersebut perlu dipasarkan ke pulau lain, salah satunya Pulau Jawa. Bila dipasarkan di Jawa, maka jaringan jalannya harus kita bangun.

Basis aktivitas di Pulau Sumatera adalah pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi maupun perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, dan pertambangan. Bila ingin mencapai pemerataan pembangunan, maka pendekatan yang didorong Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan adalah pembangunan infrastruktur berbasis wilayah, dimana di Sumatera ada beberapa WPS. Terkait WPS ini, ada yang harus kita perhatikan, yakni daerah yang tertinggal seperti Sibolga.

Untuk mengatasi daerah yang masih tertinggal ini dan untuk mencapai pemerataan, maka sentra-sentra produksi yang ada di bagian barat Sumatera bisa kita hubungkan dengan pusat-pusat distribusi yang ada di timur. Contohnya Danau Toba sebagai sentra pariwisata. Guna mendukung kawasan pariwisata ini, maka akses jalannya kita perbaiki, sehingga memudahkan para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan tersebut. Bila selama ini wisatawan yang akan datang ke Danau Toba melalui Kota Medan, maka akses jalan dari Medan ke Danau Toba harus diperbaiki.



Rusun di Temanggung Jawa Tengah yang dibangun Kementerian PUPR.

Mengangkat potensi yang ada di sisi barat Pulau Sumatera seperti lahan persawahan yang potensial, harus dilakukan. Kemudian di timur Sumatera juga dibangun aksesnya. Hal itu merupakan upaya Kementerian PUPR untuk melakukan pemerataan pembangunan. Untuk kawasan perkotaan juga dilakukan pemerataan, dimana kita menata kawasan kumuh, penyediaan rumah swadaya dan rusunawa.

Untuk Pulau Jawa, pemerataan pembangunan perlu ditingkatkan, mengingat kondisi yang ada bagian utara Jawa lebih maju dibanding selatan. Kawasan utara Jawa ini seperti Cirebon, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Daerah-daerah tersebut berkembang lebih dulu ketimbang selatan Jawa, seperti Cilacap dan Trenggalek. Tertinggalnya pembangunan di selatan Jawa ini disebabkan beberapa hal, salah satunya kondisi geografis yang ada di kawasan tersebut.

Persoalan ketimpangan ini, bisa dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya masalah akses, dimana sumber daya alam tidak bisa dioptimalkan, karena aksesnya yang tidak bagus. Untuk mengatasi hal itu Kementerian PUPR memberi akses jalan, dimana kita merintis lintas selatan Jawa secara bertahap, karena kondisi geografis yang kurang baik dan sering terjadi bencana alam. Kita juga merintis jalur dari utara ke selatan.

Master plan yang kita buat melihat masalah yang ada, potensi, dan juga daya dukung suatu kawasan. Dengan melihat berbagai aspek ini, maka pembangunan infrastruktur yang kita lakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara salah satu program yang dirintis BPIW yakni Anjungan Cerdas merupakan salah satu cara mengangkat potensi daerah. Dua anjungan cerdas yang dikembangkan ini adalah di Trenggalek di Jawa Timur dan Tabanan di Bali. Anjungan cerdas merupakan rest area yang ada di jalan nasional non tol. Pada anjungan cerdas tersebut menjual produk-produk daerah, disamping juga menjadi embrio dari kawasan wisata bagi masyarakat. Dengan adanya anjungan cerdas ini diharapkan pada area inkubasi itu menjadi tempat bertemunya produsen lokal dengan konsumen. Dengan kata lain, di kawasan ini terjadi transaksi jual beli produk yang ditawarkan. Perencanaan yang dibuat BPIW diharapkan dapat mengembangkan seluruh kawasan di Indonesia.

Ada beberapa hal yang menurut pandangan kami perlu dilakukan dalam perspektif perencanaan infrastruktur PUPR untuk merespon disparitas di wilayah Pulau Sumatera Jawa dan Bali, yakni :

A. Memastikan agar master plan dan development plan di WPS-





WPS yang berada di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa Bali bisa direalisasikan secara bertahap sesuai kerangka waktu dan kesiapan pelaksanaannya (*readiness criteria*). Upaya ini dilakukan dengan mengawal agar dukungan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan setiap tahun, sesuai dengan program yang direncanakan di dalam master plan tersebut. Diharapkan konsistensi antara perencanaan, pemograman, penganggaran dan implementasi dukungan infrastruktur PUPR ini akan mendorong WPS menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mampu mengungkit kawasan-kawasan di sekitarnya.

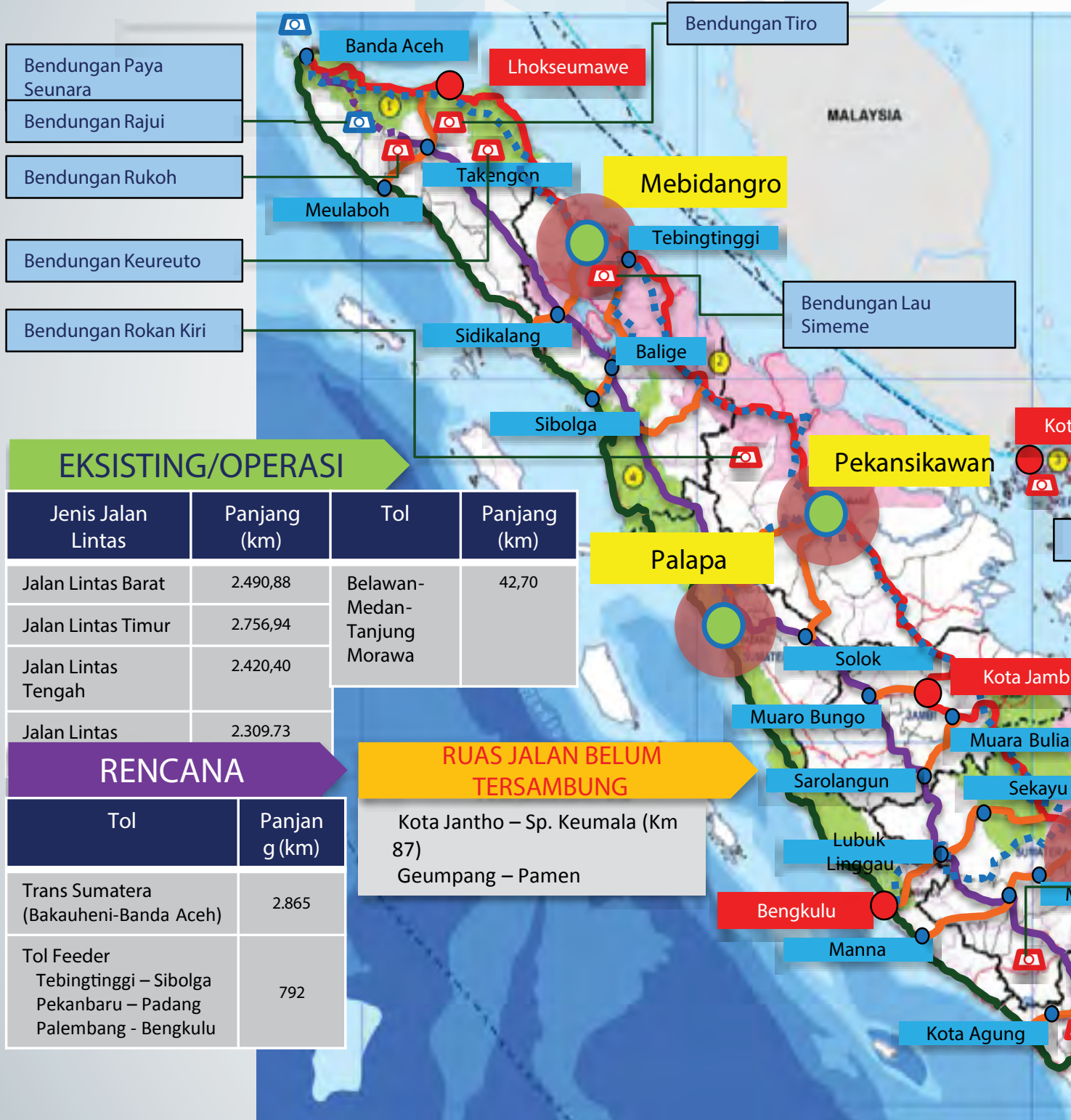
- B. Mengidentifikasi berbagai indikator-indikator utama, termasuk indikator tingkat layanan infrastruktur PUPR yang dapat digunakan untuk mengukur disparitas baik disparitas antar wilayah, antar golongan maupun disparitas kawasan perkotaan dan perdesaan.
- C. Memetakan persoalan (*problems mapping*) dan memuktahirkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan secara lebih akurat kondisi disparitas yang terjadi dan tingkat pelayanan infrastruktur PUPR di semua wilayah serta korelasi antara tingkat layanan infrastruktur PUPR dengan indikator

disparitas antar wilayah, disparitas pendapatan antar golongan dan disparitas kawasan perkotaan dan perdesaan.

- D. Mengidentifikasi lokus-lokus yang perlu diprioritaskan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPRnya dalam rangka pemenuhan tingkat layanan infrastruktur PUPR sesuai SPM.
- E. Menetapkan target pengurangan disparitas dan merumuskan rencana pengembangan (*development plan*) infrastruktur PUPR terpadu dengan pengembangan WPS-WPS terdekat.

Beberapa hal di atas diharapkan bisa dihasilkan melalui kegiatan jasa konsultasi yang dilaksanakan di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR pada tahun 2017. *Output* kegiatan tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi penajaman Renstra PUPR 2015-2019, khususnya untuk masukan bahan untuk kegiatan Pra Konsultasi Regional 2018 dan penyusunan Renstra PUPR 2020-2024.

# SISTEM KONEKTIFITAS NASIONAL PULAU SUMATERA



- Bendungan Paya Seunara
- Bendungan Rajui
- Bendungan Rukoh
- Bendungan Keureuto
- Bendungan Rokan Kiri

## EKSISTING/OPERASI

Jenis Jalan Lintas	Panjang (km)	Tol	Panjang (km)
Jalan Lintas Barat	2.490,88	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	42,70
Jalan Lintas Timur	2.756,94		
Jalan Lintas Tengah	2.420,40		
Jalan Lintas	2.309,73		

## RENCANA

Tol	Panjang (km)
Trans Sumatera (Bakauheni-Banda Aceh)	2.865
Tol Feeder Tebingtinggi – Sibolga Pekanbaru – Padang Palembang - Bengkulu	792

## RUAS JALAN BELUM TERSAMBUNG

- Kota Jantho – Sp. Keumala (Km 87)
- Geumpang – Pamen



Pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera berbasis WPS. Dalam Sistem Konektivitas Nasional untuk 10 provinsi di Pulau Sumatera ini terdapat 6 WPS, mulai dari WPS 1 yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa hingga WPS 6 yakni Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api. Dalam sistem konektivitas itu juga terdapat sejumlah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bendungan yang operasi maupun rencana, dan pembangunan jalan lintas dan jalan tol, baik yang eksisting maupun yang dalam perencanaan. Selain itu juga terdapat kawasan Metropolitan seperti Patungraya Agung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayu Agung), Kota Besar seperti Kota Batam, dan Kota Sedang-Kecil seperti Sibolga.

## Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Sumatera

- |  |  |
|--|--|
| 1 WPS Sabang-Banda Aceh-Langsa           | 4 WPS Sibolga-Padang-Bengkulu                                  |
| 2 WPS Meda-Tebingtinggi-Dumai -Pekanbaru | 5 WPS Jambi-Palembang-Pangkalpinang-Tanjungpandan              |
| 3 WPS Batam-Tanjungpinang                | 6 WPS Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api |



### Legenda

- Jalan Lintas Timur
- Jalan Lintas Tengah
- Jalan Lintas Barat
- Jalan Lintas Feeder
- - - Rencana Jalan Tol
- Jalan Tol

- Kawasan Metropolitan
- Kota Besar (PKN)
- Kota Sedang-Kecil (PKW)
- Bendungan Operasi
- Bendungan Rencana

- Bendungan Komerling II/tiga dihaji
- Bendungan Segalamider
- Bendungan Sukaraja III
- Bendungan Sukoharjo



Berbicara mengenai pariwisata di Indonesia, tidak akan ada habisnya. Negara kita tercinta ini telah dianugerahi kekayaan alam yang indah dan juga berlimpah ruah. Salah satunya adalah Kota Kupang. Di tahun 2017 ini, dana pembangunan infrastruktur untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat di NTT juga mengalami lompatan angka yang sangat signifikan. Tidak hanya itu, dilihat dari kawasan pariwisatanya pula, kota Kupang ini berkembang sangat maju. Kupang memiliki keindahan alam yang luar biasa, meskipun sebagian besar kurang terawat dan tidak dikelola, namun khususnya, di daerah pantainya memiliki pasir putih dan air laut sebiru langit yang membuat setiap orang yang berkunjung takjub melihatnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi kota kupang antara lain Pantai Pasir Panjang, Pantai Tablolong, Pantai Lasiana, serta mengunjungi gong perdamaian nusantara yang merupakan salah satu icon di kota Kupang.

### 1. Pantai Pasir Panjang

Pantai Pasir Panjang merupakan pesona wisata pantai yang berada di kota

Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini menyuguhkan pesona sunset yang cukup Indah dan banyak ditunggu oleh para wisatawan, tidak perlu biaya untuk masuk. Keunikan dan keeksotisan dari pantai Pasir panjang terletak di warna airnya yang biru cerah dan sedikit warna hijau yang sekelilingnya karang besar. Dinamakan pantai pasir panjang karena pasirnya yang luas dan panjang disekitar sisi

*Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi kota kupang antara lain Pantai Pasir Panjang, Pantai Tablolong, Pantai Lasiana, serta mengunjungi gong perdamaian nusantara yang merupakan salah satu icon di kota Kupang.*

pantai. Sayangnya tidak ada tempat untuk membuat tikar, jika ingin duduk maka pilihan satu-satunya duduk diatas pasir pantai.

Pantai Pasir Panjang di Kupang, Nusa Tenggara Timur cocok sekali untuk santai sore setelah seharian jalan-jalan. Sesuai dengan namanya, kawasan bibir pantainya cukup panjang. Warga setempat dan

wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas di sana. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa pasir di Pantai ini sangat luas sekali, dan memanjang di sepanjang pesisir Pantai Pasir Panjang, deraan ombak serta angin yang bertiup ke daratan, membuat kegiatan berlibur para pengunjung maupun wisatawan baik lokal maupun mancanegara merasa nyaman, serta menjadikan liburan ke Pantai Pasir Panjang menjadi suatu momen yang tak Mudah dilupakan. Beristirahat sejenak di pesisir pantai, menyambut angin yang datang, serta berfoto ria bersama orang-orang tercinta membuat suasana berlibur ke Kota Kupang khususnya ke Pantai Pasir Panjang ini menjadi lebih sempurna.

### 2. Pantai Tablolong

Berkunjung ke pantai Tablolong Kupang, merupakan agenda berwisata yang wajib dilakukan apabila kita pecinta wisata bahari. Pantai Tablolong ini berada di sekitar 30 kilometer dari kota Kupang. Pantai Tablolong ini memiliki pesona wajah pantai yang luar biasa memukau bagi setiap pengunjung, lantaran kekayaan aneka biota laut serta terumbu karang dan hamparan pasir putih. Tablolong merupakan salah satu arena bagi olah raga panjang baik berskala

# Menikmati Eksotisme Kota Kupang

tradisional maupun internasional. Turnamen pancing sangat digemari dan dilakukan setiap tahun dengan peserta yang datang dari berbagai daerah.

Di Pantai Tablong ini juga terdapat tempat untuk beristirahat sejenak untuk sekedar duduk duduk santai. Dibalik keindahan tablong ini, ada cerita sejarah mengenai migrasi penduduk dari rute menuju timor, maupun ketika Jepang mendarat di pulau timor. Hal ini dapat diketahui dari pustaka hasil-hasil penelitian para akademis. Terlepas dari aspek sejarahnya tersebut, Tablong telah menunjukan eksotisme yang indah dimana di pantai ini orang dapat berenang, bermain dan menikmati keindahan pantai ini, maka tak heran tempat ini begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Objek wisata ini sangat cocok bagi yang ingin berlibur bersama keluarga.

### 3. Gong Perdamaian Nusantara

Tidak hanya Keindahan eksotisme pantai saja yang ditonjolkan di kota Kupang ini, melainkan , ada wisata unik dan bersejarah di kota ini, yakni Gong Perdamaian Nusantara yang merupakan salah satu icon dari kota Kupang. Dimana Gong perdamaian nusantara ini memiliki simbol perdamaian antar umat

beragama, suku, dan masyarakat, Lokasi dari gong perdamaian ini tepat berada di depan gedung Keuangan Negara dan berdekatan dengan taman Nostalgia yang berjarak 7 kilometer dari bandara Eltari. Gong Perdamaian Nusantara ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Februari 2011.

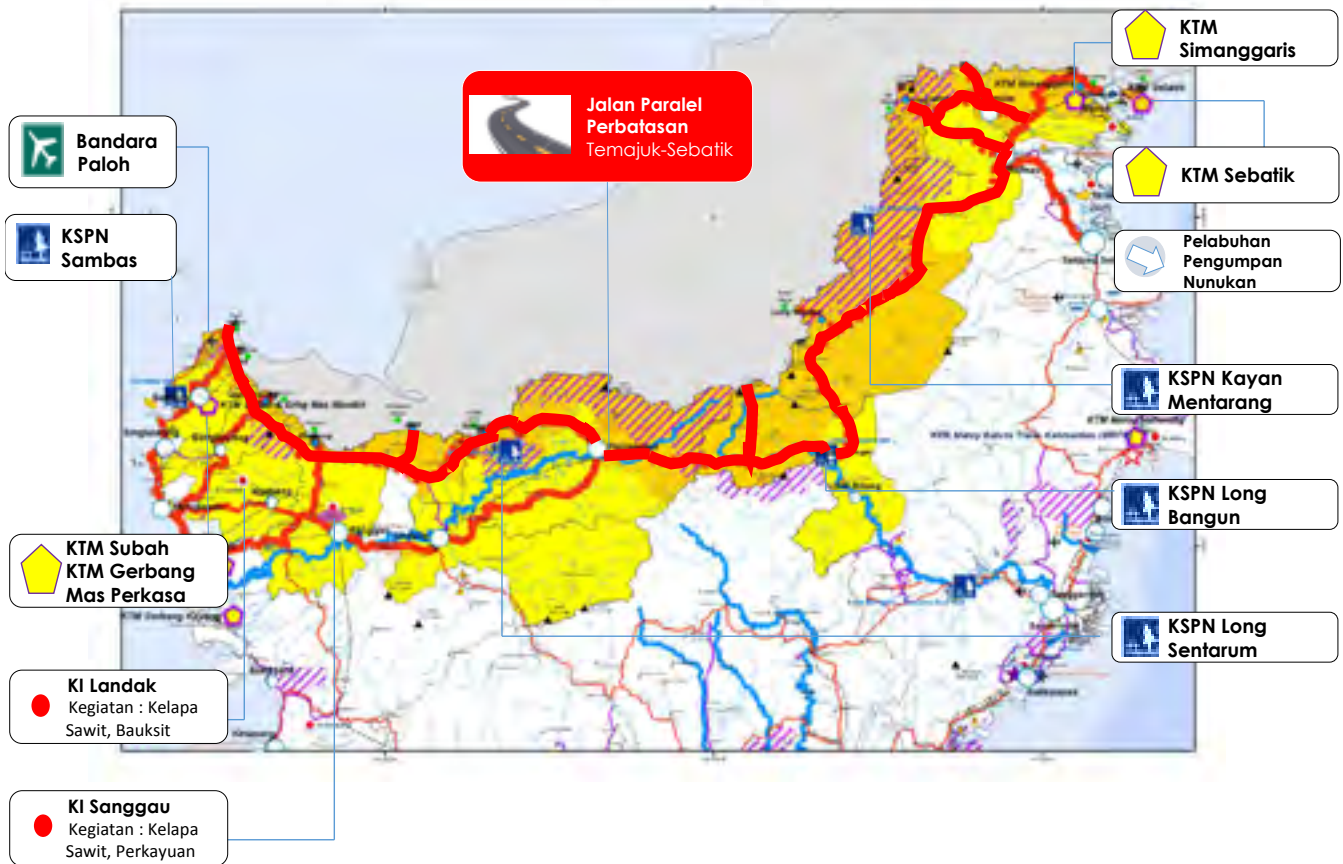
Gong perdamaian ini memiliki berbagai simbol yang tidak asing bagi kita dan memiliki lima lapisan diantaranya adalah Lingkaran Luar, Lingkaran Tengah, Lingkaran Dalam, Lingkaran Inti, dan juga lingkaran Puncak. Pada lingkaran puncak terdapat peta NKRI dimana disimbolkan sebagai bentangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di puncak peradaban bangsa tertinggi. Gong perdamaian nusantara ini jangan dijadikan hanya sebagai simbol semata, namun juga demi mewujudkan rasa cinta dan saling menghormati perbedaan yang ada disekitar kita, dengan demikian tidak ada lagi perpecahan yang mengatasnamakan sebuah perbedaan. Di Gong Perdamaian Nusantara ini pula kita bisa memanfaatkan waktu untuk bermain bersama keluarga dan juga sahabat. **(Indira)**



Sumber: istimewa

# Wilayah Pengembangan Strategis 21 Temajuk-Sebatik 2017

## ULTIMATE WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2025



### Ultimate:

Pembangunan infrastruktur PUPR sampai dengan tahun 2025 di WPS 21 (Temajuk- Sebatik) diantaranya pembangunan Infrastruktur Jalan Pararel Perbatasan Temajuk – Sebatik dan Pembangunan Bandara Paloh. Kemudian juga ada pembangunan Infrastruktur Jalan dan Bandara, Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sambas, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kayan Mentarang. Selanjutnya ada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Long Bangun dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Long Sentarum, Selain itu ada 4 Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) yakni KTM Subah, KTM Gerbang Mas Perkasa, KTM Simanggaris, dan KTM Sebatik. Tidak hanya itu, ada juga pembangunan kawasan industri Landak, kawasan industri Sanggau dan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Nunukan.

### Program Utama:

Pada program utama WPS 21 (Temajuk – Sebatik 2017) , pembangunannya terdiri dari pembangunan jalan Long Nawang – Langap, Pembangunan jalan Malinau – Long Bawan – Long Midang, dan Pembangunan jalan Mensalong – Tou Lumbis. Selanjutnya ada Pembukaan Hutan Batas Kalbar – Tiong Ohang. Selain itu ada program utama pembukaan dan peningkatan struktur Jalan Batas Kapuas Hulu/ Sintang – Nanga Badau – Lanjak, dan Pembukaan jalan Rasau – Sepulau – Bts. Kapuas

Hulu/ Sintang. Selain pembangunan Infrastruktur jalan, juga ada program pada sektor penyediaan perumahan terdapat pembangunan PSU Perumahan Kawasan perbatasan Jagoi Babang, dan Pembangunan RUSUS TNI Polri. Tidak hanya itu, diprogramkan juga pembangunan rumah khusus untuk TNI Polri di Badau, Pembangunan rumah khusus untuk Polri di Kec. Kayan Hulu, dan Pembangunan PSU Perumahan Kawasan dan RUSUS POLRI di Kawasan Perbatasan. Kemudian juga dilakukan pembangunan/ rehabilitasi perumahan tidak layak huni di Long Apari.

Terkait masalah air, ada program Pembangunan IPAL, Pembangunan intake dan pipa transmisi air baku Kab Malinau, Pembangunan TPS 3R di Kec. long Pahangai, Pembangunan SPAM IKK di Kec. Long Apari, Pembangunan TPS3R dan Pembangunan SPAM kawasan Kumuh Kota Nunukan. Selanjutnya ada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Entikong, dan Peningkatan DI. Perbatasan Kab. Sintang. Tak kalah penting adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Long Pahangai, dan SID potensi DI Perbatasan di Kab. Kapuas Hulu.

# Wilayah Pengembangan Strategis 22

## Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin

### Ultimate WPS 22

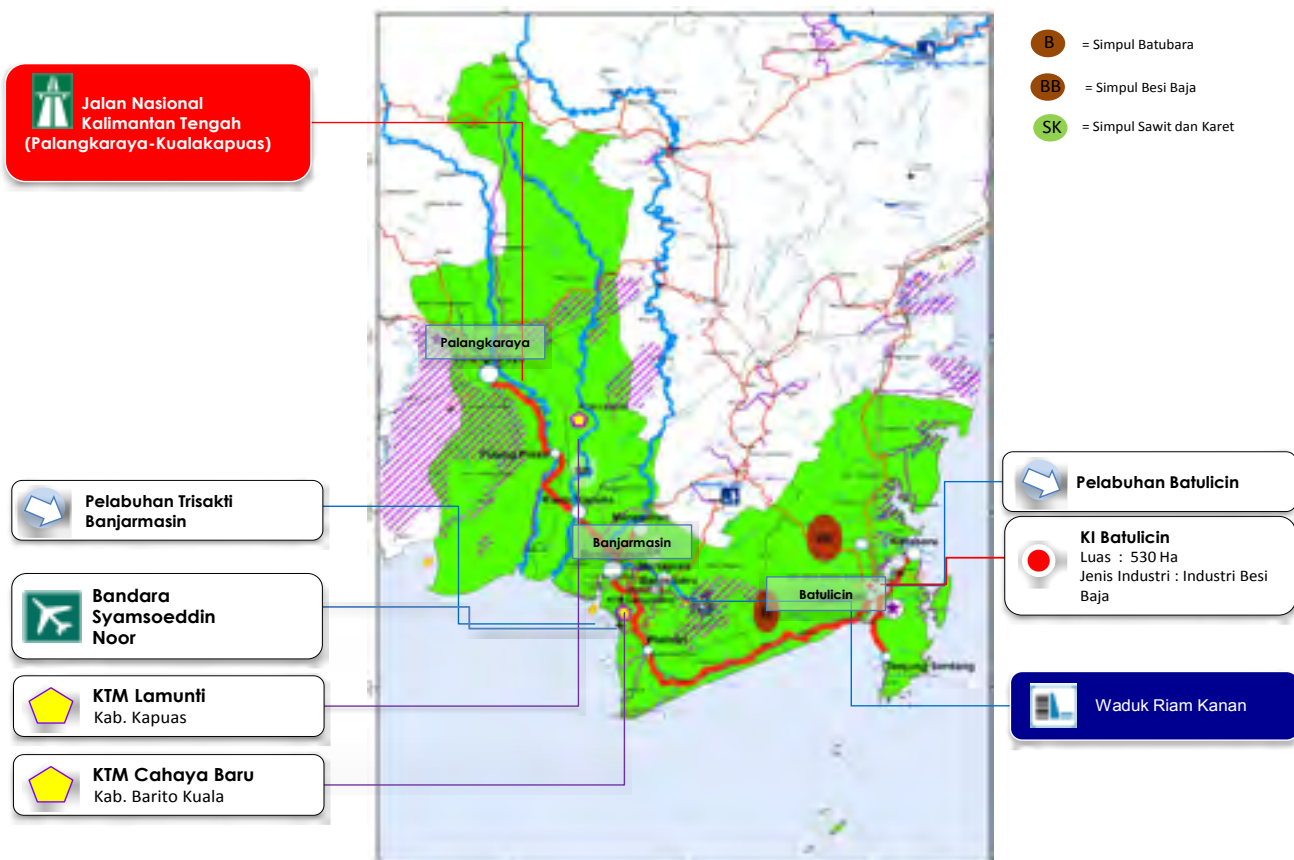
Arah pembangunan pada Wilayah Pengembangan Strategis Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin (WPS 22) adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung Kawasan Industri (KI) Batulicin yang berada pada WPS 22, pembangunan Waduk Riam Kanan. Dalam mendukung Bandara Syamsuoddin Noor sekaligus akses menuju ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terdapat pembangunan jalan nasional Kalimantan Tengah yaitu dari Palangkaraya menuju Kualakapuas. Terdapat 2 Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada WPS 22, yaitu KTM Lamunti dan KTM Cahaya Baru.

### Program Utama WPS 22

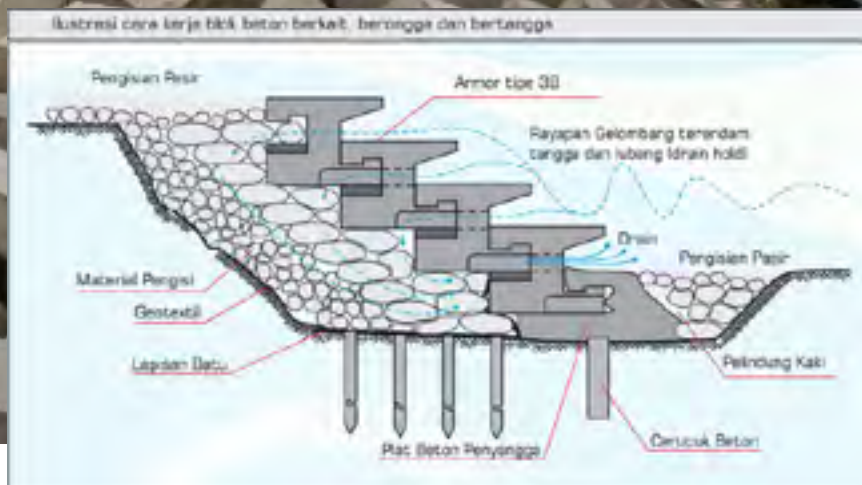
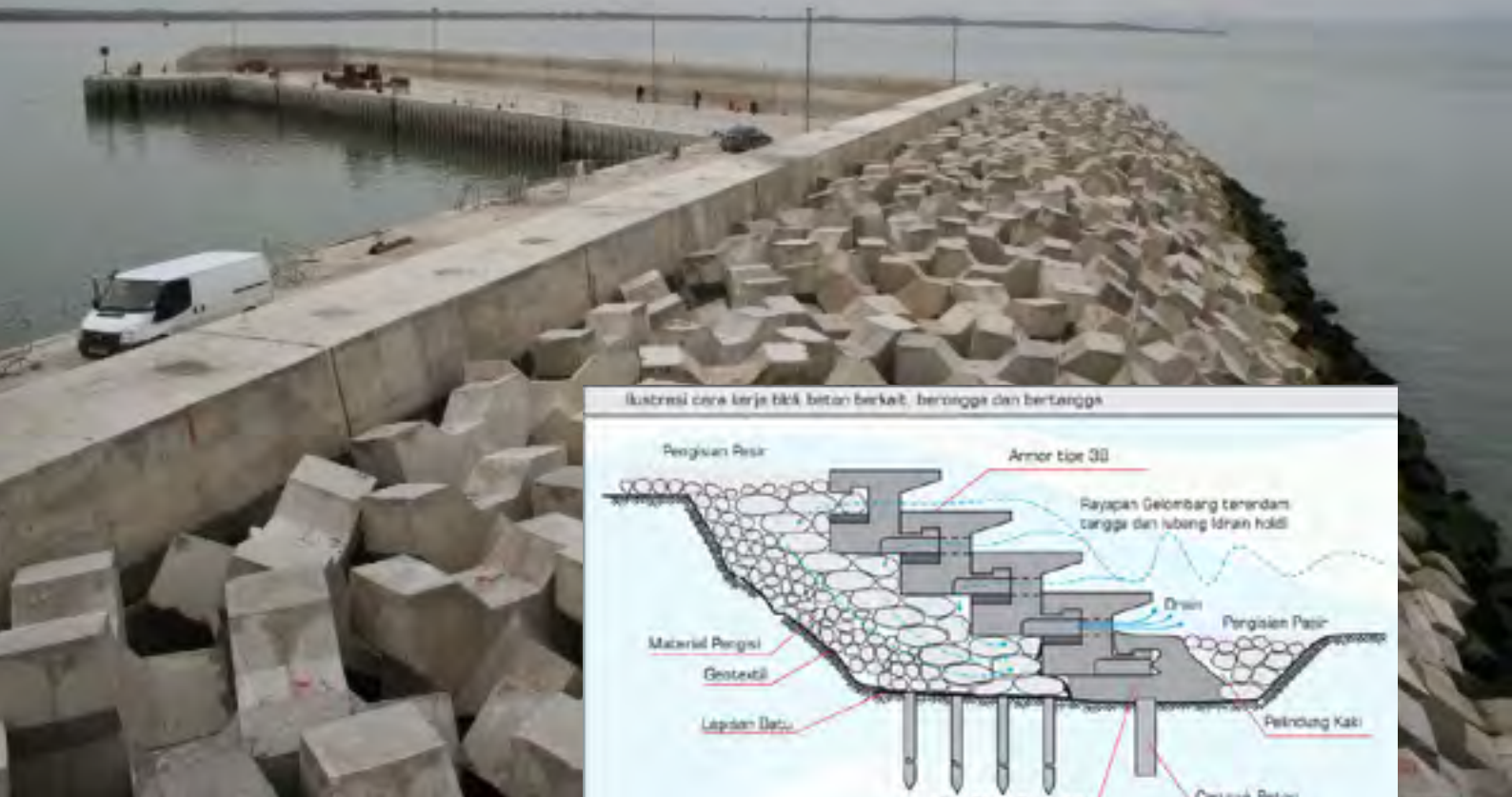
Program utama pada Wilayah Pengembangan Strategis Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin (WPS 22) adalah dari sektor Sumber Daya Air terdapat pengembangan rawa di Kabupaten Kapuas, pembangunan Bend-

ungan Tapin, pembangunan jaringan irigasi di Batang Alai dan pembangunan Bendung Batulicin. Dari sektor Bina Marga, terdapat pelebaran jalan Kota Palangkaraya menuju Tjilik Riwt, pembangunan jalan penghubung rencana Pelabuhan Batanjung Kabupaten Kapuas dengan jalan nasional, pembangunan jembatan Batulicin – Tanah Laut dan pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol) Lianggang – Pelaihari – Pagaran – Batulicin – Tanah Grogot. Dalam sektor Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kota Palangkaraya, Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Kapuas dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan Metro Banjarbakula. Terkait dengan sektor Penyediaan Perumahan, terdapat Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Perkotaan Metro Banjarbakula.

## ULTIMATE WPS 22 PALANGKARAYA-BANJARMASIN-BATULICIN 2025



# Enam Solusi Pembatas Air Karya Balitbang PUPR



Penggerusan tanah akibat air laut adalah masalah yang serius bagi masyarakat pesisir pantai. Penggerusan yang disebut erosi ini tentu saja mengganggu segala kegiatan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Erosi yang disebabkan air laut (abrasi) ini sangat merugikan, dapat mengurangi garis pantai. Untuk itu diperlukan pembatas yang kuat untuk mengurangi dampak erosi ini. Dalam hal ini Balitbang PUPR turut andil dan sudah menghasilkan 6 karya pembatas air.

## 1. Pengaman Pantai Bambu

Setiap inovasi yang diciptakan Balitbang PUPR ini tentu harus meninjau aspek sosial maupun ekonomi dengan skala prioritas. Usaha pengamanan pantai oleh penduduk pedesaan dilakukan dengan teknologi pedesaan yang menggunakan bahan lokal yang ada dan relatif murah sesuai dengan kemampuannya. Teknologi pedesaan ini menggunakan karung-karung plastik diisi pasir tanpa cerucuk dan cerucuk-cerucuk bambu yang dikombinasi dengan karung-karung plastik di belakangnya. Karung-karung pasir umumnya tidak berumur panjang akibat tidak tahan terhadap sinar matahari, sementara cerucuk bambu juga tidak berumur panjang akibat proses pelapukan. Untuk menyiasatinya, dibuatlah susunan dengan karung-karung pasir

ditutupi batu-batu, lalu kemudian yang bersentuhan langsung dengan air adalah bambu yang dipasang miring. Hal ini ternyata berhasil menghalangi deburan air laut dan mengurangi erosi.

## 2. Sangkar Beton, Blok Beton Bergigi

*Revetment* dibangun sebagai bangunan pantai yang dibuat untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai karena erosi akibat arus dan gelombang air laut maupun akibat beban bangunan yang berada di garis pantai. *Revetment* umumnya lebih ringan dibanding bangunan pantai yang lain. Dipergunakan untuk kondisi gelombang moderat (tinggi maks 1,5 m). Unit-unit lapisan luar yang langsung menahan gelombang dikenal dengan istilah armor yang bisa berupa batu atau blok-blok beton. Pada konstruksi ini, armor disebut blok beton bergigi, sementara tahananannya menggunakan sangkar beton. Unit armor beton bergigi ini seperti *puzzle*. Dicetak dan dibuat terlebih dahulu satuan sebelum disusun menjadi elemen armor *revetment*. Armor ini memiliki tulangan dengan diameter 8 mm. Sementara sangkar beton merupakan struktur balok beton bertulang dengan ukuran tinggi 0,20 m, lebar 0,20 m dan panjang 4 m. Inovasi teknologi *revetment* blok beton bergigi dan sangkar beton ini telah



diterapkan di Kabupaten Muko-muko, Bengkulu Utara. Bangunan ini cukup kuat menahan limpasan rapan gelombang dan dapat melindungi bagian belakang konstruksi/garis pantai dari bahaya abrasi.

### 3. Blok Beton, Bertulang 3B

Dulu, untuk membuat *revetment*, diperlukan batu alam yang beratnya >200 kg. Sekarang batu-batu alam tersebut sudah sangat sulit ditemui. Terlebih setelah zaman heboh batu akik berlalu. Batu-batu alam tersebut sudah banyak disulap menjadi hiasan jari. Untuk itu sebagai solusi, dicetaklah beton yang berfungsi sebagai *Revetment*. Keunggulan revetmen dengan blok beton bertulang tipe 3B karena mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Setiap komponen beton memiliki berat 230 kg/unit. Masing-masingnya memiliki tulangan sehingga bisa mengikat satu dengan yang lainnya. Prototip blok beton tipe 3B ini telah diterapkan di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tepatnya pantai di depan tempat peribadatan (Pura Taman).

### 4. Blok Beton I

i. Kerangka besi terdiri dari baja siku dan besi bulat, membentuk prisma. Untuk memperstabil struktur, di atas kerangka besi ditumpuk susunan batu kosong. Pemasangan dapat dilakukan dengan tenaga manusia (padat karya), tanpa menggunakan alat-alat berat.

### 5. Pipa Beton Silinder

Satu lagi inovasi dan PUPR bernama Pipa Beton Silinder. Dalam pelaksanaannya lebih mudah dan tanpa memerlukan alat berat. Sebagian besar konstruksi pengamanan pantai yang telah dibuat tidak menerima gaya tarik. Oleh karena itu unit-unit pipa beton tidak perlu diberi tulangan. Namun demikian dalam pengangkutannya harus hati-hati karena pipa beton tanpa tulangan akan mudah pecah. Untuk penerapan pipa beton silinder sendiri sudah diterapkan di pantai Nusa

Dua, pantai Tanjung Pasir, dan pantai Pangandaran

### 6. Blok Beton Terkunci

Selain menciptakan inovasi untuk pantai (pembatas air laut), Balitbang PUPR juga membuat solusi untuk penggerusan (erosi) akibat air sungai. Teknologi itu diberi nama Blok Beton Terkunci. Selain berfungsi sebagai penahan erosi, blok beton ini juga berfungsi untuk memperkuat krib gerusan tebing sungai dan pelindung tembok pangkal jembatan. Terdapat 3 jenis Blok Beton terkunci yang sudah diciptakan. Ketiga blok tersebut adalah blok beton balok kaki enam, beton kubus kaki enam, dan beton balok kaki delapan. Penerapan Blok Beton Terkunci ini sudah diterapkan sedikitnya di 4 provinsi. Untuk Provinsi Banten terdapat di hilir Bendung Gerak Pamarayan, Sungai Ciujung. Kemudian di Jawa Barat terdapat di Jembatan Cibarusah, Sungai Cipamingkis, Sungai Cibadak, dan Sungai Ciliwung. Selanjutnya di Kebun Raya Bogor: Sungai Cikacengan, Jembatan Cibuni. Di Jawa Timur berada di hilir Bendung Karet Jati Mlerek, Sungai Brantas. Sedangkan di Sulawesi Selatan, di Jembatan Sempaga.

*Erosi yang disebabkan air laut (abrasi) ini sangat merugikan, dapat mengurangi garis pantai. Untuk itu diperlukan pembatas yang kuat untuk mengurangi dampak erosi ini.*

# PRA KONSULTASI REGIONAL

## Pra Konreg Palembang

Pra Konsultasi Regional pertama dilaksanakan di Palembang, dilaksanakan pada 7-9 Maret lalu dan diikuti seluruh provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Barat. Berikut foto-foto kegiatannya



Seremoni penyerahan buku



Desk Bangka Belitung



Pojok Informasi



Pendaftaran peserta



Pada bulan Maret, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melaksanakan Pra Konsultasi Regional di 4 kota, yakni di Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado. Berikut dokumentasinya.

## Pra Konreg Surabaya

Pra Konsultasi Regional kedua dilaksanakan di Surabaya, 15-17 Maret lalu dan dihadiri para peserta dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Berikut dokumentasi kegiatannya



Menyanyikan lagu Indonesia Raya



Kebersamaan usai penyerahan buku



Desk Jawa Timur



Aktifitas diskusi Desk NTB

## Pra Konreg Kupang

Pra Konsultasi Regional ketiga, diadakan di Kota Kupang pada 21-23 Maret lalu dan diikuti peserta seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut foto-foto kegiatannya.



Suasana saat mendengarkan arahan Menteri PUPR melalui video rekaman.



Foto usai penyerahan buku.



Suasana diskusi di Desk Kalimantan Barat



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

# Pra Konreg Manado

Pra Konsultasi Regional keempat, diadakan di Kota Manado pada 29-31 Maret lalu dan diikuti seluruh provinsi di Pulau di Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.



Pose bersama usai acara seremoni pembukaan



Suasana di Desk Sulawesi Tengah



Diskusi di Desk Papua



Peserta menyimak acara pembukaan

# Kebijakan *Tax Amnesty*



## Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)

### Apa itu Amnesti Pajak?

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

### Siapa yang bisa memanfaatkan?

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

### Penanda tangan di Surat Pernyataan:

1. Wajib Pajak orang pribadi;
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

### Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;

5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

### 6. Mencabut permohonan:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- keberatan;
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
- banding;
- gugatan; dan/atau
- peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

### Kapan berlakunya?

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Dengan adanya kebijakan ini pemerintah berharap mendapat tambahan anggaran dari para wajib pajak. Selain itu diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

# Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



Kartunis: Oki Heryanto



## 5 Cara Menata Ruang Kerja Kantor Anda Agar Nyaman

Kantor dapat dikatakan sebagai rumah kedua karena sepertiga hari Anda dihabiskan di kantor. Oleh karena itu, tentunya cukup penting untuk mendekorasi kantor menjadi nyaman dan mendukung kegiatan Anda bekerja. Selain itu, kebanyakan perusahaan yang produktif selalu menata kantornya menjadi tempat yang baik dan nyaman, bahkan melebihi kenyamanan rumah. Jika Anda sedang mencari cara menata ruang kerja kantor, ada baiknya untuk menyimak 10 tips berikut demi ruangan yang nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas Anda.

### 1. Tempatkan Layar Komputer Setinggi Mata

Salah satu hal yang seringkali membuat leher sakit adalah posisi komputer yang lebih rendah dari posisi mata ketika Anda duduk. Akibatnya, sepanjang hari Anda terus-menerus melihat komputer dengan menunduk. Cobalah untuk meninggikan tempat laptop sampai layar sejajar dengan mata Anda. Jika memang meja yang terdapat dalam fasilitas kantor cukup rendah, cobalah untuk menggunakan keyboard bluetooth yang terpisah dari laptop untuk tetap bisa mengetik dengan posisi tangan rileks namun juga leher yang tidak kaku. Layar laptop atau komputer juga sebaiknya diatur agar sedikit miring ke belakang sekitar 10-15 derajat, sehingga mata Anda tidak terlalu lelah untuk menatap layar laptop.

### 2. Tempatkan Papan di Sisi Meja Kerja

Untuk menata ruang kerja kantor menjadi lebih efisien, cobalah letakkan satu buah papan yang memiliki magnet atau paku

kecil untuk menempelkan berbagai kertas. Nantinya papan ini akan berisikan mengenai segala hal yang harus Anda kerjakan, jadwal rapat, serta berbagai hal penting lainnya. Anda juga bisa menggunakan *sticky notes* untuk menempelkan kertas-kertas yang bertuliskan berbagai macam hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jika suatu pekerjaan sudah selesai, Anda tinggal mencabut *sticky notes* tersebut sehingga hanya hal yang belum selesailah yang ada di papan. Di sebelah papan ini, jangan lupa untuk menggantung kalender kecil yang bisa Anda tandai untuk hari-hari penting dan berbagai jadwal yang ditulis. Pastikan papan memiliki warna yang cukup menarik bagi Anda dan membuat Anda tidak stres memandangnya.

### 3. Tambahkan Tanaman Hidup

Jika Anda bekerja di kubikel dalam ruangan tertutup, cobalah tambahkan tanaman hidup sebagai hiasan di meja Anda. Tidak perlu yang besar-besar dan rumit merawatnya, cobalah sukulen, kaktus, atau bambu Cina untuk diletakkan di ujung meja. Tumbuhan seperti sukulen dan kaktus memang memiliki berbagai jenis spesies dan warna yang menarik, sehingga dapat mencerahkan meja kerja Anda. Apalagi tumbuhan tersebut tidak perlu disiram terlalu banyak dan dapat tumbuh baik di ruang tertutup. Tumbuhan yang ada di meja juga dapat memberikan energi positif bagi orang yang memandangnya, dan membuat meja kerja Anda semakin terlihat hidup.

### 4. Tambahkan Foto Keluarga

Agar bekerja menjadi lebih semangat, cobalah untuk menambahkan foto keluarga di meja kerja Anda. Aturlah sedemikian

rupa sehingga foto tersebut berada di posisi yang selalu Anda lihat namun tidak mengganggu pekerjaan Anda. Jika ruang kerja Anda adalah sebuah kubikel, pasanglah foto keluarga dan berbagai foto yang membuat Anda semangat di sekeliling dindingnya. Tambahkan aksesoris seperti lukisan, kartu pos, atau apa pun yang berwarna cerah sehingga kubikel Anda terlihat memberikan energi positif dan semangat. Foto keluarga juga bisa Anda pasang sebagai wallpaper di laptop atau komputer, sehingga setiap kali Anda mulai bekerja, Anda tahu ada orang-orang yang menantikan kesuksesan Anda di rumah.

### 5. Rapikan Segala Sesuatu

Di meja kerja yang kurang teratur, biasanya akan berserakan berbagai macam alat tulis kantor dari mulai pensil, pulpen, kertas, penggaris, selotip, dan sebagainya. Adalah hal yang salah jika menurut Anda hal ini tidak memengaruhi produktivitas kerja, karena dengan menatanya lebih teratur, Anda akan lebih mudah menemukan barang yang Anda perlukan serta bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat, sehingga produktivitas pun meningkat. Oleh karena itulah, cobalah sediakan tempat bagi masing-masing barang yang Anda perlukan, misalnya menempatkan pensil dan pulpen di satu gelas terpisah, kemudian meletakkan kertas dan alat tulis besar pada baki yang sudah didekorasi dengan gaya Anda sendiri. Untuk menempatkan segala sesuatu, Anda juga dapat membuat sendiri tempat untuk berbagai macam barang sesuai kebutuhan dan luas meja kerja Anda.

# Prioritaskan Pengembangan Lima Kawasan Strategis

## Atbah Romin Suhaili

Bupati Sambas

Pemerintah Kabupaten (Pemb) Sambas Provinsi Kalimantan Barat bertekad melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Peralannya, Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Warga wilayah perbatasan perlu memiliki kesejahteraan yang baik, agar jiwa nasionalismenya dapat terawat dengan baik.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menuturkan, saat ini masih banyak hal yang perlu dilakukan di Sambas dalam rangka mengangkat kemakmuran masyarakatnya. Atbah menjelaskan, Pemkab Sambas memiliki strategi pengembangan infrastruktur dan kawasan di daerahnya dengan memprioritaskan lima kawasan strategis.

"Yakni pengembangan Kawasan Wisata Temajuk, Kompleks Kesultanan Sambas, Kebun Raya Sambas, Kawasan Wisata

---

**"Dengan adanya bandara waktu tempuh menuju Sambas akan lebih singkat, sehingga peluang kunjungan ke Sambas juga akan makin banyak," terangnya.**

---

Gunung Senujuh dan Rencana Pengembangan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Sambas," ungkap Atbah saat ditemui "Sinergi" di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Kawasan Wisata Temajuk dan Kompleks Kesultanan Sambas, menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Sambas karena kawasan tersebut memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya," terangnya.

la menambahkan, banyak wisatawan dari Malaysia dan Brunei mengunjungi Temajuk dan Kompleks Kesultanan Sambas, namun para wisatawan saat melakukan kunjungan biasanya melakukan dengan cara pulang-pergi. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana di destinasi tersebut belum terlalu memadai, seperti masih kurangnya hotel, penginapan dan lainnya, sehingga manfaat yang diterima dari kunjungan wisatawan masih belum begitu optimal.

Selain itu, ada pengembangan Kebun Raya Sambas dan

Kawasan Wisata Gunung Senujuh. Kawasan tersebut perlu dikembangkan karena memiliki nilai strategis dari sudut fungsi, daya dukung lingkungan hidup serta kepentingan konservasi alam.

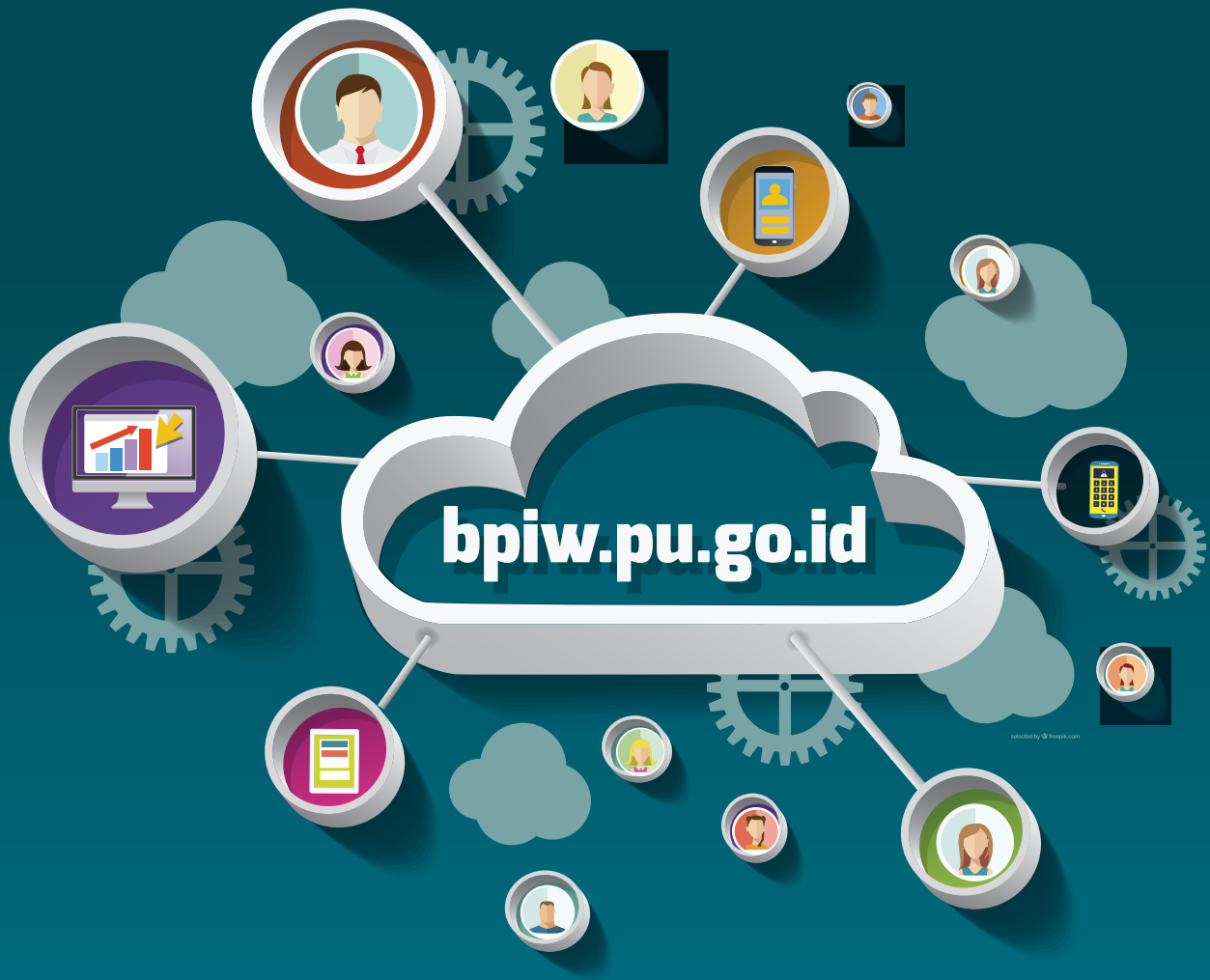
Terkait bandara, Atbah mengatakan, Kabupaten Sambas dirasa perlu melakukan terobosan dalam sarana transportasi, agar tingkat kunjungan wisatawan dapat semakin tinggi. "Dengan adanya bandara waktu tempuh menuju Sambas akan lebih singkat, sehingga peluang kunjungan ke Sambas juga akan makin banyak," terangnya.

la juga menerangkan, saat ini di Sambas telah berdiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk yang cukup membuat iri warga negara tetangga. Hanya saja, kehadiran PLBN dinilai masih perlu ditambah dengan berbagai infrastruktur penunjang lainnya, agar manfaat pembangunannya semakin dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, penambahan berbagai infrastruktur penunjang akan makin mengokohkan kebanggaan dan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah Kabupaten

Sambas. "Serta akan semakin mengangkat masyarakat mencapai kesejahteraan," ujar Atbah.





**KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:**

 [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)

 @informasiBPIW

 @informasiBPIW

 Layanan Informasi BPIW

 BPIW/kementerianPUPR



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**